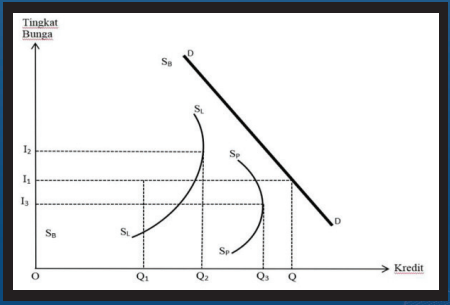
ISSN 3090-8485

ORASI ILMIAH: RISET DAN INOVASI

MEMPERKUAT INKLUSIVITAS PROGRAM KREDIT DALAM KOMPLEKSITAS DAN SEGMENTASI PERSAINGAN DI PASAR KEUANGAN MIKRO

ORASI ILMIAH PROFESOR RISET
ILMU EKONOMI
BIDANG MONETER DAN PASAR KEUANGAN
KEPAKARAN KEUANGAN MIKRO



OLEH:

AGUS EKO NUGROHO

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

ISSN 3090-8485

MEMPERKUAT INKLUSIVITAS PROGRAM KREDIT DALAM KOMPLEKSITAS DAN SEGMENTASI PERSAINGAN DI PASAR KEUANGAN MIKRO

Diterbitkan pertama pada 2026 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

ISSN 3090-8485

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

ORASI ILMIAH: RISET DAN INOVASI

MEMPERKUAT INKLUSIVITAS PROGRAM KREDIT DALAM KOMPLEKSITAS DAN SEGMENTASI PERSAINGAN DI PASAR KEUANGAN MIKRO

ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
ILMU EKONOMI
BIDANG MONETER DAN PASAR KEUANGAN
KEPAKARAN KEUANGAN MIKRO

OLEH:
AGUS EKO NUGROHO

Penerbit BRIN

© 2026 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Memperkuat Inklusivitas Program Kredit dalam Kompleksitas dan Segmentasi Persaingan di Pasar Keuangan Mikro/Agus Eko Nugroho. Jakarta - Penerbit BRIN, 2026

viii + 79 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISSN 3090-8485

1. Program kredit
2. Keuangan mikro
3. Segmentasi persaingan
4. Inklusi keuangan

332.7

Copy editor : Donna Ayu Savanti
Proofreader : Donna Ayu Savanti
Penata Isi : Donna Ayu Savanti
Desainer Sampul : Donna Ayu Savanti

Edisi pertama : Oktober 2026



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No.8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: +62 811-1064-6770
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DAFTAR ISI

BIODATA RINGKAS 1
PRAKATA PENGUKUHAN 3
BAB I PENDAHULUAN..... 5
BAB II PERSPEKTIF PERKEMBANGAN KEILMUAN: PROPOSISI TEORETIS 11
2.1 Paradigma Keuangan Mikro 11
2.2. Proposisi-1: Prinsip Kompleksitas Keuangan Mikro 16
2.3 Proposisi-2: Prinsip Segmentasi Persaingan 18
2.4 Proposisi-3: Prinsip Kontradiksi dalam Inklusivitas Keuangan..... 22
BAB III KONTRIBUSI EMPIRIS..... 27
3.1 Evolusi Program Kredit Mikro di Indonesia..... 27
3.2 Prinsip Kompleksitas Karakteristik dan Segmentasi Pasar Keuangan Mikro: Uji Empiris Proposisi-1 dan Proposisi-2 31
3.3 Marginalisasi LKM Pada Kerangka Makroekonomi: Uji Empiris Proposisi-3 36
BAB IV KONTRIBUSI ILMIAH..... 41
BAB V KONTRIBUSI UMUM 43
BAB VI KESIMPULAN..... 45
BAB VII PENUTUP..... 47
UCAPAN TERIMA KASIH 49
DAFTAR PUSTAKA..... 51
DAFTAR CAPAIAN DALAM BIDANG IPTEK, RISET, DAN INOVASI..... 59

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 73
A. DATA PRIBADI 73
B. PENDIDIKAN FORMAL 74
C. PENDIDIKAN NON FORMAL 74
D. JABATAN STRUKTURAL 75
E. JABATAN FUNGSIONAL 75
F. KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN ILMIAH 76
G. CAPAIAN DALAM BIDANG IPTEK, RISET, DAN INOVASI 77
H. PEMBINAAN KADER ILMIAH 78
I. ORGANISASI PROFESI ILMIAH 79
J. TANDA PENGHARGAAN 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Segmentasi Pasar Kredit Mikro 19
Gambar 2. Kontradiksi antara Kepentingan Korporasi Perbankan dan LKM dalam Inklusivitas Keuangan 24
Gambar 3. Keterkaitan Antarproposisi 26
Gambar 4. Evolusi Program Kredit Mikro di Indonesia 28
Gambar 5. Karakteristik Keberagaman Pelaku dalam Keuangan Mikro di Indonesia 32
Gambar 6. Spesialisasi LKM Menurut Segmen Penggunanya 35
Gambar 7. Dominasi Perbankan dan Marginalisasi LKM 38

BIODATA RINGKAS



Agus Eko Nugroho adalah Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia lahir di Bojonegoro pada tanggal 12 Oktober 1968 sebagai anak pertama dari pasangan H. Ismoen (alm.) dan Hj. Siti Muniah.

Ia menikah dengan Sri Wiyantini dan dikarunia tiga anak, Fairuz Gianirfan Nugroho, Fayza Qairina Uzma, dan Fahrezi Azka Gifari.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M TAHUN 2022 tanggal 19 Januari 2022, ia diangkat sebagai Peneliti Ahli Utama di Badan Riset dan Inovasi Nasional terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 211/I/HK/2026 tanggal 14 September 2026, ia dapat melakukan orasi pengukuhan Profesor Riset.

Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di SDN Dengok 2, SMPN 1 Padangan, Bojonegoro, dan SMAN 1 Cepu, Blora. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 1993, Master of Applied Economics (M.Appl.Econ.) dari Department of Applied Economics, Masey University, New Zealand pada tahun 2000, dan Ph.D. dari School of Economics and Finance, Curtin University, Australia pada tahun 2010.

Karier jabatan fungsional peneliti diawali dari Asisten Peneliti Muda pada tahun 1997 di Pusat Penelitian Ekonomi dan Pembangunan (PEP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ajun Peneliti

Muda (2003), Peneliti Muda (2006), Peneliti Madya (2010), dan Peneliti Ahli Utama (2017) (Keppres No. 83/M Tahun 2017). Ia diangkat sebagai Peneliti Ahli Utama pada Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2021 (Keppres No. 34/M 2022).

Adapun karier jabatan struktural diawali sebagai Kepala Subbidang Kerja Sama, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (2001–2005), Kepala Bidang Keuangan dan Perbankan, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (2013–2014), Kepala Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (2014–2015), Kepala Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI (2015–2019), Kepala Pusat Riset Ekonomi, BRIN (2019–2021), serta Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN (2022–sekarang).

Ia aktif dalam organisasi profesi, antara lain sebagai anggota Perhimpunan Periset Indonesia (2022–sekarang), sebagai dewan editor pada Jurnal Ekonomi Pembangunan BRIN (2020–sekarang), sebagai anggota Dewan Riset Nasional (2015–2019), serta editor pada berbagai penerbitan buku dalam bidang ekonomi, UMKM, perbankan, dan keuangan mikro. Selain itu, ia juga bertindak sebagai pembimbing dan penguji disertasi di Universitas Indonesia dan IPB University.

Ia pernah mendapatkan Best Paper Award pada Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBI), FEB, UGM pada tahun 2009. Ia juga telah menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X (2010), XX (2014), dan XXX (2024), serta Satyalancana Pembangunan (2014).

PRAKATA PENGUKUHAN

Bismillaahirraahmaanirrahiim.

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mulia, dan hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara orasi ilmiah pengukuhan profesor riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya pada tanggal 8 Oktober 2026 menyampaikan orasi ilmiah dengan judul:

"MEMPERKUAT INKLUSIVITAS PROGRAM KREDIT DALAM KOMPLEKSITAS DAN SEGMENTASI PERSAINGAN DI PASAR KEUANGAN MIKRO"

Pada orasi ini, tiga proposisi utama telah saya uji secara empiris selama 20 tahun terakhir, khususnya dalam memahami dinamika keuangan mikro di Indonesia, yaitu (a) Proposisi-1: kompleksitas karakteristik lembaga keuangan mikro (LKM), (b) yang berimplikasi pada Proposisi-2, relasi kelembagaan yang dinamis dan pola persaingan yang tersegmentasi, dan (3) konsekuensinya, Proposisi-3, intervensi penyaluran program kredit bersubsidi melalui perbankan akan cenderung distortif dan berpotensi memarginalkan pelaku LKM.

Pengabaian prinsip ini, pada ujungnya akan menjadi kendala utama bagi pemerintah dalam membangun industri keuangan mikro yang kompeten, berdaya saing dan inklusif.

Dalam perjalanannya, berbagai program kredit mikro memiliki dua karakter utama, yaitu: (1) pola subsidifikasi yang distortif. (2) Beragam program kredit mikro menghadapi masalah besarnya kredit macet, seperti Program Kredit Bimas (1967-1984), Kredit Usaha Tani/KUT (1984-2000), KKPE, PUAP, dan berbagai program kredit oleh Pemda. Meskipun Program KUR memiliki ekspansi yang besar, tetapi berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat dan memarginalkan LKM.

Orasi ini diharapkan dapat menjadi landasan teoretis dan empiris bahwa kombinasi pendekatan ekonomi politik dan pasar keuangan sangat penting untuk memahami secara holistik kompleksitas keuangan mikro. Pendekatan ini juga sangat bermanfaat dalam merumuskan kebijakan program kredit mikro yang berpihak pada usaha mikro-kecil (UMK), dan sekaligus memperkuat industri keuangan mikro di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya percepatan pencapaian inklusi keuangan, khususnya bagi peningkatan akses pembiayaan skala kecil bagi masyarakat miskin dan berpendapatan rendah serta UMK.

Industri keuangan mikro yang berdaya saing dan inklusif menjadi basis bagi sumber pembiayaan UMK sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, baik dalam konteks sebagai sumber pendapatan, penyerapan tenaga kerja maupun pemberdayaan kewirausahaan.

BAB I. PENDAHULUAN

"Credit operations' of whatever shape or kind do affect … the working of the monetary system...,the working of the capitalist engine,… [and], become an essential part of it without which the rest cannot be understood at all" (Schumpeter 1954: 318).

Naskah orasi ini merupakan perjalanan penelitian selama kurang lebih dua dekade untuk memahami kompleksitas bisnis lembaga keuangan mikro (LKM). Studi mendalam terkait dinamika bisnis LKM sangat esensial karena sebagai aktor utama dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Bisnis UMK masih menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional, dan sumber pendapatan masyarakat kecil, namun secara persisten menghadapi kelangkaan modal.

Pada konteks makro, struktur perekonomian nasional menunjukkan bahwa meskipun mayoritas nilai tambah (sekitar 60% dari PDB) dikontribusikan oleh UMK, penyaluran kredit skala mikro-kecil hanya sekitar 18,5% dari total kredit perbankan. Proporsi kredit UMKM selama tahun 2010-2015 hanya berkisar 18-19%, sementara tahun 2024 dan tahun 2025, masing-masing sekitar 19,8% dan 18,6%. Sebaliknya, proporsi kredit skala menengah-besar mencapai 81,5% pada tahun 2023, tahun 2024 sebesar 81,2%, dan tahun 2025 sebesar 81,4% (BPS, 2025).

Sedangkan, pada konteks mikro dan meso, praktek keuangan mikro adalah bagian dari kebiasaan sosial *(social habit)* untuk mengatasi problema keuangan, seperti pinjam-meminjam antar kerabat, tetangga, *arisan, mendering, gadoh, gaden,* dan lain sebagainya. Maraknya bisnis *fintech* dan pembayaran digital dewasa ini mempertegas besarnya kebutuhan atas layanan keuangan mikro di masyarakat (Saptia & Nugroho, 2020). Hal ini menunjukkan

bahwa masyarakat kecil, terutama kelompok miskin dan UMK masih menghadapi kesenjangan pembiayaan *(financing gap)* yang signifikan antara besarnya permintaan dan terbatasnya layanan yang tersedia. Kebijakan inklusi keuangan yang menekankan pada peran korporasi perbankan *(downscaling services of bank),* seperti ditekankan pada pendekatan komersialisasi keuangan mikro (Charitonenko et al. 2004) belum mampu memperkuat akes pembiayaan bagi kelompok ini. Analisis kritis terhadap pendekatan komersial ini pada konteks Indonesia masih belum banyak dilakukan. Sebaliknya, kebijakan perluasan bank penyalur program KUR oleh perbankan swasta dan BPD sejak tahun 2021 mempertegas bahwa adopsi pendekatan komersial dalam penyaluran program ini mengabaikan konsekuensi negatif terhadap ekosistem keuangan mikro. Pada konteks inilah, orasi ini bertujuan mengkritisi pendekatan ini.

Program kredit mikro sebagai bagian dari LKM menjadi tema sentral dalam naskah ini karena tiga alasan. *Pertama,* dalam konteks ekonomi politik, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam implementasi beragam program kredit mikro untuk pemberdayaan UMK (Ermawati, Adi & Nugroho, 2024). Namun demikian, pengalaman panjang dan kompleksitas keuangan mikro tetap menjadi *puzzle* yang belum dirangkai menjadi konsep, teori atau model pengembangan LKM, sebagai suatu industri keuangan skala-kecil yang inklusif bagi keberlanjutan bisnis UMK. Kompleksitas karakteristik keuangan mikro ini belum dimaknai secara penting dalam diskursus keuangan mikro, terutama pendekatan pasar keuangan dalam mengurai masalah informasi asimetris pada penyaluran program kredit mikro. Menurut pandangan saya, masalah asimetris ini dalam konteks keuangan mikro bukan hanya bersumber dari kesulitan atau ketidakmampuan korporasi perbankan dalam menilai kinerja bisnis UMK *(creditworthiness)*, tetapi juga karakteristik dan perilaku sosioekonomi dan budaya dari UMK dalam aspek keuangan yang tidak kompatibel dengan model bisnis perbankan yang rigid dan formal. Maknanya, dalam konteks

keuangan terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan antara pasar keuangan mikro dengan pasar keuangan skala korporasi.

Kedua, mayoritas kredit program yang disalurkan melalui perbankan, seperti program KUR, pada tataran ekonomi politik memiliki dimensi kontradiksi yang berpotensi memarginalkan LKM. Hal ini terjadi karena pendekatan komersial dari kredit program cenderung mengabaikan adanya segmentasi persaingan pasar dalam keuangan mikro. Akibatnya, penyaluran program kredit bersubsidi melalui perbankan akan cenderung distortif, dan berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat dengan pelaku LKM. Karena hanya berbasis pada dimensi pasar keuangan (Charitonenko & Afwan, 2004; Charitonenko et al. 2004), dampak negatif ini tidak banyak dikupas oleh pendekatan komersial. Implikasinya, pemerintah sebagai lembaga kunci hanya menggunakan instrumen program kredit untuk menyediakan kredit murah kepada UMK bukan untuk memperkuat kemampuan bisnis LKM.

Ketiga, sebaliknya, strategi pendekatan pasar keuangan melalui liberalisasi keuangan, sepeti deregulasi perbankan dan modernisasi BRI-unit sejak tahun 1980an memanifestasikan pengabaian kompleksitas bisnis keuangan mikro. Meskipun BRI-unit desa tumbuh menjadi contoh sukses pengembangan jejaring perbankan skala kecil (Robinson, 2001), menurut saya, dalam konteks ekonomi politik kinerja ini tidak merepresentasikan kemajuan LKM di Indonesia. Mayoritas pelaku LKM, seperti koperasi simpan-pinjam (KSP), modal ventura, BPR dan BPRS, serta pegadaian memiliki kemampuan bisnis yang relatif stagnan (Nugroho, 2009). Bahkan, selama satu dekade terakhir, jumlah BPR turun cukup signifikan dari 1,643 unit tahun 2014 menjadi 1,402 unit tahun 2023 atau menurun sebesar 14%, meskipun jumlah BPRS meningkat dari 164 menjadi 173 unit (sekitar 5%) dalam periode yang sama (BPS, 2024). Sementara kredit bermasalah (NPL) mencapai sekitar 9,97% dari total kredit tahun 2023, jauh diatas NPL perbankan umum yaitu sekitar 2,49% pada tahun yang sama (OJK, 2023).

Substansi dari naskah orasi ini mengupas justifikasi teoretis atas tiga proposisi, dan menyajikan hasil uji proposisi melalui sejumlah penelitian yang telah dilakukan selama tahun 2005–2025. **Proposisi-1:** *keuangan mikro memiliki kompleksitas karakteristik baik dari aspek keberagaman pelaku dan pengguna, perilaku bisnis, maupun dinamika relasi antar kelembagaan.* Dalam kerangka politik ekonomi, relasi dinamis ini dapat dimaknai sebagai pola hubungan yang bersifat kausalitas, *unstable* (konflik-sinergi) dan *interlinking* dimensi komersial dan nonkomersial. Karakteristik unik ini belum dimaknai secara proporsional oleh paradigma keuangan mikro. Kompleksitas karakteristik ini belum banyak dikupas oleh pendekatan pasar keuangan, khususnya dalam mengidentifikasi masalah inti dalam pasar keuangan, yaitu informasi asimetris dan *moral hazard* sebagai penentu tingginya risiko dan biaya dalam bisnis keuangan mikro.

Proposisi-2: sebagai implikasinya, *pasar keuangan mikro akan cenderung memiliki pola persaingan yang tersegmentasi atau persaingan yang tidak sempurna (imperfect competition).* Dalam diskursus keuangan mikro, segmentasi pasar ini hanya dimaknai sebagai pola relasi kontrak kredit antara rentenir dengan debiturnya, misalnya pembayaran kredit yang diikatkan dengan hasil produksi atau penjualan komoditas tertentu *(trade-credit linkage)* (Aleem, 1993; Hoff & Stiglitz, 1997). Menurut pendapat saya, segmentasi ini banyak dilakukan oleh lembaga keuangan mikro lainnya, seperti KSP, koperasi syariah (BMT), BPR/BPRS karena pembatasan wilayah operasional, ketidakcukupan sumber dana dan SDM, keterikatan budaya, agama dan aspek sosial lainnya. Pola persaingan tersegmentasi ini tidak dimaknai penting sehingga distorsi pasar akibat implementasi program kredit bersubsidi cenderung terabaikan. Dalam kerangka ekonomi politik, proposisi ini menyanggah asumsi bahwa pola relasi kelembagaan keuangan mikro bersifat statis, harmonis atau persaingan yang sehat/*fair*.

Proposisi-3: *dalam relasi antar lembaga keuangan mikro yang bersifat dinamis, kebijakan liberalisasi keuangan akan berimplikasi pada persaingan yang tidak sehat, dan berpotensi memarginalkan LKM.* Proposisi mengkritisi pendekatan komersial yang menganggap bahwa strategi inklusi keuangan yang bias perbankan akan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat miskin dan UMK. Oleh karena itu, strategi liberalisasi pasar keuangan mikro menjadi kontradiksi dalam konteks Indonesia karena esensinya, memanifestasikan pola relasi kelembagaan yang bias perbankan. Akibatnya, tidak fokus pada penguatan kapabilitas bisnis LKM.

Dari ketiga proposisi tersebut terlihat bahwa Proposisi-1 dan Proposisi-2 menekankan analisis pada tataran mikroekonomi, sedangkan Proposisi-3 pada tataran makroekonomi. Ketiga proposisi ini akan dikupas secara teoretis di Bab II, dan pengujian empiris atas proposisi tersebut di Bab III. Sedangkan, Bab IV dan Bab V masing-masing memuat refleksi teoretis dan kebijakan. Kesimpulan akhir dari naskah ini diuraikan di Bab VI, dan Bab VII sebagai penutup.

BAB II. PERSPEKTIF PERKEMBANGAN KEILMUAN: PROPOSISI TEORETIS

Bab ini menguraikan proposisi teoretis yang diajukan dalam naskah orasi, sebagai aspek penting untuk memahami kompleksitas keuangan mikro di Indonesia. Untuk itu, uraian singkat tentang perkembangan paradigma keilmuan bidang keuangan mikro akan disajikan untuk mencermati relevansi proposisi tersebut terhadap perkembangan konsep, teori dan arus-utama kebijakan dalam keuangan mikro.

Selanjutnya, bab ini menjelaskan secara detail landasan teoretis atas tiga (3) proposisi yang diajukan, yaitu: Proposisi-1, prinsip kompleksitas karakteristik dalam keuangan mikro; Proposisi-2, dalam kerangka kompleksitas ini, pola persaingan pasar keuangan mikro akan cenderung tersegmentasi; dan Proposisi-3, dalam kerangka persaingan yang tersegmentasi, kebijakan program kredit mikro yang bias perbankan akan berimplikasi pada persaingan yang tidak sehat dan berpotensi memarginalkan pelaku LKM.

2.1 Paradigma Keuangan Mikro

Pada awalnya keuangan mikro adalah bagian dari strategi pembangunan pertanian tahun 1960/70-an. Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian diyakini bersumber dari kelangkaan modal *(capital scarcity)* di pedesaan. Kelangkaan ini secara umum ditunjukkan oleh tingginya bunga kredit perdesaan, dan maraknya praktik rentenir di masyarakat. Fenomena kelangkaan modal ini dimaknai identik dengan masalah kelangkaan komoditas *(commodity shortage)* di pasar barang. Dalam kerangka inilah, menurut paradigma pasar barang saat itu, tingginya bunga kredit adalah akibat dari adanya keterbatasan pasokan kredit *(supply shortage)* di pasar keuangan mikro. Artinya, tingginya bunga kredit dimaknai ekuivalen dengan tingginya harga barang di pasar.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh paradigma pasar barang adalah intervensi langsung pemerintah melalui penyaluran program kredit mikro. Peningkatan *supply* kredit ini diyakini akan menurunkan bunga kredit perdesaan.

Namun demikian, proposisi paradigma pasar barang ini tidak didukung oleh fakta empiris. Banyak penelitian menunjukkan bukti yang berlawanan. Penambahan *supply* kredit melalui program kredit mikro pemerintah terbukti tidak mampu menurunkan tingginya bunga kredit perdesaan. Sebaliknya, fakta empiris menunjukkan bahwa (1) kegagalan kredit program akibat besarnya tingkat kemacetan *(default rate)*, (2) praktik rentenir tetap berlanjut hingga sekarang, dan (3) stagnasi produktivitas pertanian (Morduch, 2006; Armendariz & Morduch, 2005; Gonzales-Vega, 1989; Nugroho, 2006).

Menurut pandangan saya, kelemahan paradigma pasar barang esensinya pada kelangkaan modal yang diidentikkan dengan fenomena ketidakcukupan pasokan barang di pasar. Kelangkaan ini dimaknai sepenuhnya sebagai kegagalan pasar, dimana *supply-demand gap* menyebabkan tingginya bunga kredit. Namun demikian, saya sepakat dengan paradigma pasar barang bahwa produktivitas usaha, khususnya UMK, tidak ditentukan sepenuhnya oleh aspek keuangan tetapi kemampuannya dalam melakukan inovasi produksi, jejaring pemasaran dan/atau bisnis.

Seminal artikel oleh Stiglitz dan Weis (1981) berpengaruh besar pada pergeseran menuju paradigma pasar uang. Menurut paradigma ini, kelangkaan modal bagi UMK bersumber dari dua masalah fundamental, yaitu: problema informasi asimetris dan *moral hazard* yang secara inheren terjadi di pasar keuangan mikro. Kedua masalah ini berimplikasi pada besarnya risiko dan biaya operasional dalam penyaluran kredit mikro kepada UMK. Karena perbankan sebagai pelaku utama pasar uang tidak mampu memecahkan kedua masalah tersebut, mereka cenderung membatasi pasokan kredit skala kecil

(credit rationing) pada UMK. Pembatasan kredit ini menyebabkan kelangkaan kredit bagi kelompok usaha ini. Maknanya, menurut pendapat saya, tingginya bunga kredit tidak sepenuhnya karena perilaku LKM, seperti rentenir, yang eksploitatif, tetapi besarnya biaya transaksi dan tingginya risiko dalam penyaluran kredit mikro/kecil kepada UMK.

Namun demikian, solusi yang ditawarkan, baik oleh paradigma pasar uang maupun pasar barang tetap sama, yaitu *penggunaan instrumen kredit program untuk memecahkan kelangkaan modal di pasar keuangan mikro.* Perbedaan utamanya terletak pada bagaimana peran subsidi dan tata kelola program tersebut.

Dalam perjalanannya, paradigma pasar uang berkembang menjadi dua arus pemikiran, yaitu: (1) pendekatan komersial *(commercial-oriented approach),* dan (2) pendekatan misi sosial *(social mission approach)*. Menurut pendekatan misi sosial, pengembangan LKM harus tetap mempertahankan misi originalnya yaitu pemberdayaan masyarakat miskin dan/atau UMK. Oleh karenanya, keberadaan subsidi masih tetap 'rasional' selama dikelola secara akuntabel dan transparan. Sebaliknya, menurut pendekatan komersial, subsidi kredit harus dihilangkan karena hanya akan mendistorsi pasar dan cenderung salah sasaran. Solusinya adalah pemberian insentif kepada perbankan untuk menjangkau kelompok marginal ini.

Saat ini pendekatan komersial menjadi arus utama diskursus keuangan mikro global, termasuk di Indonesia. Menurut pendekatan ini, solusi atas kelangkaan modal UMK adalah melalui rekayasa kebijakan agar perbankan mampu menjangkau kelompok ini yang mayoritas belum *bankable*. Oleh karena itu, rekomendasi yang disarankan mengarah pada dua strategi (Charitonenko et al. 2004): *Pertama,* penguatan kapabilitas perbankan *(down-scaling services)* untuk menjangkau segmen UMK. Di Indonesia, program KUR adalah manifestasi dari strategi ini. *Kedua,* transformasi organisasional

LKM menjadi perbankan skala kecil *(organizational up-scaling)*. Transformasi kelembagaan Badan Kredit Kecamatan (BKK) dan Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau BPR Syariah adalah replikasi strategi ini di Indonesia. Ada tendensi bahwa agenda inklusivitas keuangan nasional pun hanya mengarah pada penguatan peran perbankan ini.

Menurut pandangan saya, pendekatan komersial ini memiliki dua kelemahan mendasar. *Pertama,* relasi kelembagaan dalam keuangan mikro tidak dimaknai secara proporsional atau diasumsikan bersifat harmonis. Bahkan mungkin diabaikan. Menurut pandangan saya, variasi tingkat bunga kredit yang signifikan di pasar keuangan mikro menunjukkan eksistensi relasi kelembagaan yang dinamis, dan pola persaingan antar pelaku yang tersegmentasi. Pola persaingan yang tersegmentasi ini sebagai refleksi dari kompleksitas karakteristik yang berimplikasi pada perbedaan target pasar, biaya operasional dan cara memitigasi risiko oleh masing-masing pelaku LKM. Oleh karena itu, pola relasi ini semestinya dimaknai penting secara teoretis dalam diskursus keuangan mikro.

Kedua, presumsi bahwa persaingan bebas (liberalisasi pasar) sebagai pilihan terbaik dalam peningkatan efisiensi layanan kredit mikro tidak cukup relevan. Secara teoretis, presumsi ini tidak relevan pada konteks Indonesia karena kompleksitas dalam karakteristik bisnis keuangan mikro memunculkan masalah informasi asimetris dan biaya transaksi yang signifikan. Maknanya, pada saat perbankan mendapatkan insentif subsidi untuk menyalurkan kredit murah, maka dengan pola persaingan yang tidak diatur *(unregulated),* pasokan kredit murah tidak otomatis akan menurunkan bunga kredit di pasar. Sebaliknya, persaingan pasar menjadi tidak sehat dan berpotensi memarginalkan LKM. Sementara *supply-demand gap* terus terjadi sehingga bunga kredit di pasar keuangan mikro tetap tinggi.

Dengan mempertimbangkan dua kelemahan dari pendekatan komersial, berdasarkan hasil review teoretis di atas, maka saya mengangkat tiga proposisi dalam menjelaskan dan mengurai kompleksitas keuangan mikro dan kredit program dalam pemberdayaan UMK. Tiga proposisi yang dimaksud adalah: (Proposisi-1) kompleksitas dalam karakteristik bisnis keuangan mikro merefleksikan pola relasi kelembagaan yang dinamis sehingga pola persaingan pasar cenderung tersegmentasi (Proposisi-2). Konsekuensinya, prioritas kebijakan yang bias perbankan akan berimplikasi pada persaingan yang tidak sehat dan berpotensi memarginalkan LKM (Proposisi-3).

Proposisi saya ini pada dasarnya sejalan dengan pendekatan komersial, dimana isu sentral dalam keuangan mikro adalah masalah informasi asimetris dan biaya transaksi yang signifikan (Stiglitz & Weis, 1981; Aleem, 1993; Hoff & Stiglitz, 1997) dalam penyaluran kredit mikro. Namun demikian, perbedaan utamanya terletak pada pemaknaan kompleksitas karakteristik yang terkait dengan dinamika relasi antar kelembagaan dan segmentasi persaingan. Menurut pandangan saya, kompleksitas ini tidak dimaknai secara proporsional oleh pendekatan komersial. Konsekuensinya, solusi yang ditawarkan hanya menekankan pada 'persaingan mutlak' untuk mencapai efisiensi operasional melalui penghapusan semua bentuk subsidi. Menurut pandangan saya, peran pemerintah sangat penting terutama untuk menjaga persaingan yang sehat melalui segmentasi pasar. Peran subsidi tetap penting, bukan untuk menyediakan kredit murah tetapi untuk memperkuat kemampuan bisnis LKM dalam menjangkau lebih banyak UMK.

Namun, terkait dengan subsidi ini, pendapat saya berbeda dengan pendekatan misi sosial yang hanya menekankan pada penyediaan kredit murah kepada UMK. Maraknya praktik rentenir dengan bunga tinggi menunjukkan bahwa bukan kredit murah yang dibutuhkan UMK, tetapi skema kredit mikro yang mudah, cepat dan fleksibel. Menurut analisis saya, program kredit murah cenderung mendistorsi

pasar, dan memunculkan persaingan yang tidak sehat *(unfair)*. Lebih jauh lagi, meskipun secara umum, proposisi saya sejalan dengan paradigma pasar uang dalam memaknai fenomena keuangan mikro, tetapi saya sepakat dengan paradigma pasar barang bahwa keberhasilan pemberdayaan UMK akan ditentukan oleh peningkatan produktivitas UMK itu sendiri, sementara peran LKM hanya sebagai intermediator terhadap proses tersebut.

2.2. Proposisi-1: Prinsip Kompleksitas Keuangan Mikro

Proposisi-1 menegaskan bahwa kompleksitas dalam karakteristik bisnis keuangan mikro merefleksikan pola relasi kelembagaan yang dinamis. Dalam konteks ekonomi politik, aspek kompleksitas ini yang membedakannya dengan bisnis korporasi perbankan. Ekosistem keuangan mikro memiliki kompleksitas dalam karakteristik karena (1) faktor keberagaman pelaku *(heterogeneous agents/institutions)*, (2) informalitas dan fleksibilitas pelayanan, (3) variabilitas UMK sebagai target pasar, keberagaman motif pemanfaat layanan keuangan, serta (4) kuatnya pengaruh faktor sosial-budaya, baik dalam praktik bisnis maupun pemanfaatan layanan keuangan.

Dalam kerangka ini, meskipun memiliki kapasitas finansial yang besar, perbankan menghadapi banyak keterbatasan dalam menjangkau UMK. Keterbatasan ini terkait dengan rigiditas peraturan, dan yang lebih penting lagi, operasional bisnis perbankan ini secara sosiologis jauh *(socially distant)* dari pelaku UMK. Perbankan juga akan menghadapi kesulitan untuk memastikan pemanfaatan kredit untuk tujuan produktif karena keberagaman motif penggunaan kredit tersebut oleh UMK (Gonzales-Vega, 1989). Bagi UMK, pemanfaatan kredit memiliki banyak tujuan, baik untuk membiayai konsumsi, produksi ataupun pengeluaran sosial lainnya. Hal ini sulit dideteksi oleh perbankan akibat pola ketidakterpisahan *(interlinking)* antara perilaku konsumsi dan produksi/investasi oleh pelaku UMK. Dalam konteks

inilah kompleksitas karakteristik memunculkan masalah informasi asimetris dan *moral hazard* yang harus dihadapi oleh perbankan.

Dalam kompleksitas karakteristik keuangan mikro, masalah informasi asimetris dan *moral hazard* akan sulit dipecahkan oleh perbankan sehingga berujung pada besarnya risiko dan biaya operasional dalam penyaluran kredit mikro kepada UMK. Sebagai implikasinya, perbankan akan membatasi kredit UMK melalui prosedur aplikasi kredit yang ketat/rigid, informasi kredit historis yang baik, persyaratan agunan dan/atau penjaminan kredit. Meskipun bunga kredit perbankan relatif rendah, ketentuan ini umumnya sulit dipenuhi oleh mayoritas UMK. Konsekuensinya, kredit perbankan secara alamiah akan lebih tersalurkan pada segmen usaha menengah-besar (UMB), bukan UMK.

Sebaliknya, pelaku LKM dapat menjangkau segmen UMK dengan mekanisme penyaluran kredit yang lebih fleksibel, informal, dan tanpa persyaratan agunan. Namun demikian, tingkat bunganya cenderung tinggi karena besarnya biaya transaksi dalam penyaluran kredit mikro kepada UMK. Berbeda dengan perbankan, agunan fisik tidak esensial karena kontrak kredit ini berdimensi modal sosial, seperti norma kekerabatan, saling percaya *(mutual trust)* dan resiprositas sebagai pengganti agunan fisik *(collateral substitute)* (Postelnicu et al. 2013; Karlan, 2007). Di Indonesia, pola penyaluran kredit seperti ini umum dijumpai pada koperasi (KSP/BMT), BPK/BKD, kelompok simpan-pinjam *(arisan)*, rentenir dan lain sebagainya. Dalam kerangka ini, kompleksitas karakteristik akan menyebabkan adanya segmentasi pasar kredit mikro yang ditandai dengan keberagaman tingkat bunga. Secara teoretis, terjadi *multiple equilibria* di pasar keuangan mikro (Aleem, 1993; Hoff & Stiglitz, 1997; Armendariz & Morduch, 2005).

Dalam kerangka kompleksitas, relasi kelembagaan akan bersifat dinamis, atau secara teoretis merujuk pada pola persaingan yang tidak sempurna. Dalam pola persaingan seperti ini, masing-masing

LKM akan mempertahankan pasar spesifiknya *(niche market)* melalui penguatan loyalitas nasabah dan/atau pembatasan wilayah operasional. Implikasinya, bila ekspansi perbankan memasuki wilayah atau pelanggan tertentu, akan dimaknai LKM sebagai ancaman atas eksistensinya (Aleem, 1993). Resistensi koperasi atau kelompok simpan-pinjam tertentu terhadap penyaluran kredit program melalui perbankan adalah manifestasi ancaman bagi pangsa pasar yang dimilikinya. Rumor negatif di masyarakat bahwa kredit program sebagai bantuan sosial yang tidak perlu dikembalikan adalah bagian dari resistensi terhadap pola persaingan di pasar kredit mikro (Nugroho et al., 2014). Maknanya, kompleksitas keuangan mikro merefleksikan pola relasi kelembagaan yang dinamis, bukan statis/harmonis (Geleta, 2015).

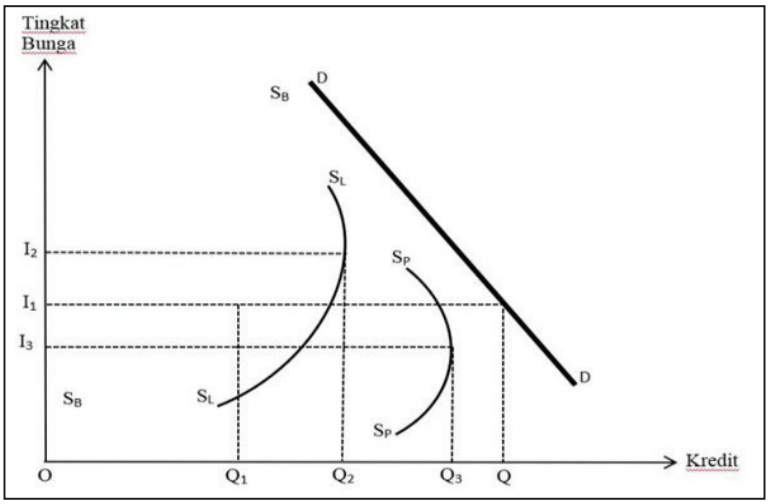
2.3 Proposisi-2: Prinsip Segmentasi Persaingan

Merujuk pada Proposisi-2, dalam kompleksitas karakteristik dan pola relasi kelembagaan yang dinamis, maka pola persaingan pasar keuangan mikro akan cenderung tersegmentasi. Seperti dijelaskan sebelumnya, kompleksitas pelaku dan pengguna keuangan mikro secara teoretis mempertegas relevansi adanya masalah informasi dan moral hazard yang berdampak pada besarnya risiko dan biaya operasional yang signifikan. Masalah informasi ini pada umumnya terkait dengan sulitnya mengidentifikasi kelayakan kredit UMK yang sangat beragam. Sementara biaya operasional berkaitan dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan LKM dalam mengantisipasi masalah moral hazard dalam setiap transaksi kredit tanpa agunan.

Oleh karena upaya memecahkan masalah ini, masing-masing pelaku LKM akan fokus pada target pasarnya yang spesifik, maka pola persaingan pasar yang terjadi akan cenderung tersegmentasi. Segmentasi ini secara teoretis akan ditandai dengan variabilitas tingkat bunga, dan spesifikasi LKM pada target pelanggan dan/atau wilayah

tertentu (spesialisasi). Dalam kerangka ini, menurut pendapat saya, intervensi kebijakan yang mendistorsi pasar akan menghasilkan pola persaingan yang tidak sehat dan berpotensi memarginalkan pelaku LKM. Oleh karena itu, program kredit mikro bersubsidi harus didesain sangat hati-hati karena cenderung mendistorsi pasar, dan berpotensi menjadi penyebab kegagalan program kredit itu sendiri (Morduch, 2006; Meyer & Nagarajan, 2006; Tsai, 2004).

Gambar 1 menjelaskan secara teoretis bagaimana segmentasi pasar kredit mikro terjadi. Secara teoretis, dua asumsi penting untuk mengkonstruksi Gambar 1, yaitu (1) kompleksitas pengguna menyebabkan masalah informasi asimetris, dan (2) asumsi relasi *concave function* antara ekspektasi pengembalian *(expected return)* dengan tingkat bunga.



Keterangan:

S_B = Kurva Penawaran Bank; S_P = Kurva Penawaran Program Kredit;
S_L = Kurva Penawaran LKM lainnya; D = Permintaan Kredit oleh UMK

Sumber: Nugroho (2009)

Gambar 1. Segmentasi Pasar Kredit Mikro

Merujuk pada Stiglitz dan Weis (1981), Gambar 1 menunjukkan bahwa kondisi ekuilibrium tidak pernah tercapai. Implikasinya akan terjadi segmentasi pasar *(multiple equilibria)*, dimana perbankan hanya akan bersedia menyalurkan kredit sebesar OQ_1 dengan tingkat bunga sebesar OI_1. Pada tingkat bunga ini, permintaan kredit *(credit gap)* yang tidak dapat dipenuhi oleh perbankan adalah sebesar Q_1Q. Adanya *supply-demand gap* ini memberi ruang bagi LKM untuk melakukan penetrasi kredit sebesar Q_1Q_2. Meskipun tingkat bunga lebih tinggi yaitu sebesar OI_2, tambahan kredit menyebabkan *gap* ini menurun dari Q_1Q menjadi Q_2Q. Tingginya tingkat bunga ini terutama karena LKM harus menanggung besarnya biaya operasional kredit untuk memecahkan masalah informasi asimetris dan *moral hazard*. Secara teoretis, biaya yang signifikan ini esensinya untuk menanggulangi besarnya risiko kredit tanpa agunan *(non-collateral)*, dan beragam pengeluaran untuk membangun dan mempertahankan loyalitas nasabah.

Namun demikian, pada saat pasokan kredit kepada UMK dimaknai masih terlalu rendah, pemerintah akan menggunakan instrumen program kredit mikro untuk menambah *supply* di pasar. Agar kredit program dapat diakses oleh UMK secara luas, maka tingkat bunga ditetapkan lebih rendah (OI_3) melalui beragam subsidi. Rendahnya tingkat bunga ini karena pembiayaan subsidi bersumber dari anggaran pemerintah (APBN/APBD) untuk pemberdayaan UMK. Implikasinya, penyaluran kredit mikro kepada UMK meningkat menjadi (Q_2Q_3). Dimensi pemberdayaan ini yang menjadi landasan teoretis bagi pendekatan misi sosial untuk menjustifikasi pentingnya subsidi dalam program kredit mikro. Namun, proposisi saya tidak sejalan dengan pendekatan misi sosial terkait subsidi. *Menurut proposisi ini, tingkat bunga rendah pada program kredit akan mendistorsi pasar secara signifikan dan berpotensi menghasilkan pola persaingan yang tidak sehat.*

Oleh karena itu, merujuk Proposisi-2, tiga fenomena unik dalam keuangan mikro yang harus diuji secara empiris, yaitu: *Pertama,* adanya spesialisasi target pasar sebagai respon terhadap kompleksitas dalam karakteristik pengguna keuangan mikro. Dalam kompleksitas karakteristik ini, perbankan menghadapi banyak kendala dalam memvaluasi kelayakan kredit UMK yang sangat beragam. Oleh karena itu, target bisnis perbankan akan cenderung difokuskan pada segmen usaha menengah dan besar (UMB) karena kelayakan bisnisnya relatif mudah diidentifikasi, kepemilikan agunan fisik, dan biaya operasional yang relatif rendah. Sebaliknya, LKM akan berspesialisasi pada segmen UMK melalui penyaluran kredit yang lebih fleksibel, informal, dan tanpa agunan fisik, atau berbasis sosial. Namun, LKM ini memiliki jangkauan pelayanan yang terbatas karena rendahnya kapasitas bisnis yang dimiliki. Sementara itu, karena kesamaan orientasi pada pelayanan UMK dan/atau kelompok miskin, target pasar dari program kredit mikro akan bersinggungan kuat dengan LKM.

Kedua, segmentasi persaingan akan termanifestasikan oleh variabilitas tingkat bunga yang signifikan di pasar keuangan mikro. Perbankan akan cenderung menetapkan bunga relatif rendah untuk membatasi kredit *(credit rationing)* karena ekspansi kredit mikro rentan terhadap risiko kemacetan. Artinya, perbankan akan sangat selektif dalam penyaluran kredit mikro karena sulitnya menilai kelayakan bisnis UMK yang beragam, ketiadaan agunan, dan tanpa akuntasi keuangan yang memadai. Sementara, program kredit mikro akan menetapkan bunga kredit lebih rendah lagi karena orientasinya untuk pemberdayaan. Risiko kredit macet cenderung diabaikan karena profitabilitas operasional bukan tujuan utama dari program kredit mikro ini.

Ketiga, pentingnya aspek modal sosial dalam keuangan mikro. Bagi perbankan, modal sosial dalam bentuk *individualistic trust* dimanifestasikan oleh pentingnya ketentuan agunan fisik, dan komunikasi intensif antara petugas bank dengan nasabahnya. Bagi

LKM koperasi, koperasi Syariah, BKK/BKD, pelaku pegadaian, *Arisan* dan rentenir yang operasionalnya secara sosiologis dekat dengan kelompok masyarakat kecil, mereka akan lebih menekankan pada pentingnya agunan sosial, seperti norma saling percaya *(mutual trust)*, resiprokal, dan sanksi sosial. Norma-norma sosial ini secara teoretis adalah instrumen penting untuk memecahkan masalah moral hazard. Hal ini antara lain karena ketidakjujuran yang menyebabkan kredit macet memberikan konsekuensi sosial bagi pelakunya, seperti dipergunjingkan, dikucilkan ataupun sanksi adat tertentu.

2.4 Proposisi-3: Prinsip Kontradiksi Dalam Inklusivitas Keuangan

Proposisi-3 menegaskan bahwa pada kerangka keuangan inklusi, relasi antar kelembagaan yang bersifat dinamis dalam keuangan mikro akan menyebabkan adanya kontradiksi antara kebijakan liberalisasi keuangan dan pengembangan LKM. Pada konteks ekonomi politik, dalam struktur masyarakat yang kompleks dimana beragam kelembagaan dengan berbagai kepentingan dan tujuan saling terkait, maka relasi antar individu, kelompok ataupun kelembagaan tersebut akan cenderung bersifat dinamis dan/atau kontradiksi (O'Hara, 2022). Artinya, asumsi bahwa relasi kelembagaan keuangan mikro bersifat harmonis, secara teoretis menjadi tidak relevan.

Menurut pandangan saya, pola relasi dinamis ini tidak dimaknai secara proporsional oleh pendekatan komersial, bahkan cenderung diabaikan. Pengabaian pola relasi ini pada ujungnya akan menyebabkan kegagalan program pengembangan LKM dan/atau UMK. Hal ini karena desain program, mulai dari proses bisnis, ketentuan hingga metode monitoring dan evaluasi tidak kompatibel dengan pola relasi antar LKM dan/atau UMK.

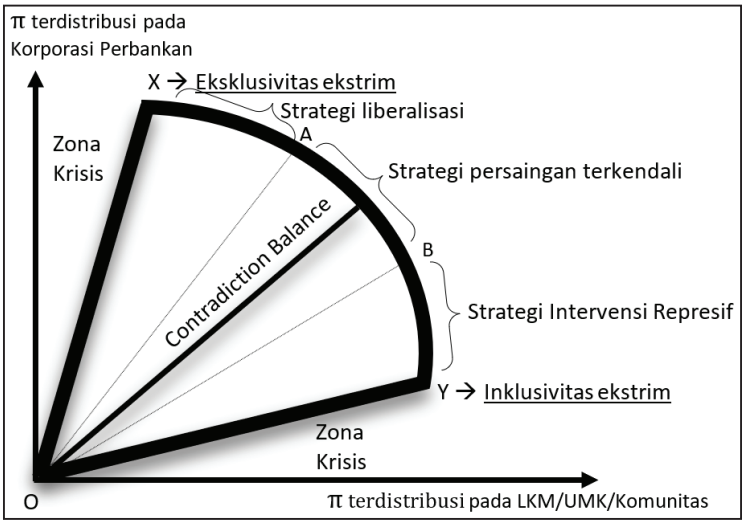
Menurut saya, proposisi ini penting karena ilmu ekonomi pada dasarnya tidak cukup sepakat terkait peran sektor keuangan ini.

Menurut paradigma pasar barang (Robinson, 1952), peran sektor keuangan secara makro, khusus perbankan adalah netral karena hanya akan mengikuti produktivitas sektor riil. Artinya, intervensi langsung pemerintah sebaiknya difokuskan pada penguatan kemampuan bisnis UMK, bukan pada pasar uang. Sebaliknya bagi pendukung paradigma pasar uang, operasional perbankan yang prudent dapat menstimulus produktivitas sektor riil, termasuk UMK (King & Levine, 1993). Namun masalahnya, mayoritas UMK tidak mampu mengakses kredit perbankan karena berbagai faktor, seperti rigiditas prosedur aplikasi kredit, ketiadaan agunan, tidak cukup percaya diri, alasan keagamaan dan lain sebagainya. Implikasinya, mereka akan lebih banyak memanfaatkan sumber pembiayaan dari LKM.

Menurut data OJK (2017), indeks literasi pembiayaan perbankan hanya sekitar 19% (untuk pinjaman dengan jaminan), meskipun pemahaman atas produk perbankan, khususnya tabungan telah mencapai 90%. Artinya, dalam kerangka inklusi keuangan, aksesibilitas masyarakat terhadap kredit perbankan masih sangat rendah. Berbeda dengan perbankan, mekanisme kredit dari LKM ini lebih fleksibel, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Motivasi mereka tidak hanya pertimbangan bisnis tetapi juga aspek informalitas, moralitas kebersamaan dan resiprositas (Aleem, 1993; Hoff & Stiglitz, 1997).

Mencermati keterbatasan UMK dalam mengakses kredit perbankan, PBB telah menetapkan tahun 2005 sebagai *International Year of Microcredit.* Selanjutnya, inklusivitas keuangan dioperasionalkan sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan global (MDGs dan SDGs). Keuangan inklusi juga telah menjadi kebijakan nasional sejak tahun 2010. Namun, agenda inklusivitas keuangan ini dikritisi telah menggeser diskursus dari semula penguatan bisnis LKM menuju liberalisasi pasar keuangan mikro. Singkatnya, keuangan inklusi adalah 'agenda liberalisasi' yang menekankan pada persaingan pasar untuk menjangkau UMK yang *unbankable*.

Menurut pandangan saya, strategi keuangan inklusi melalui liberalisasi persaingan pasar justru berpotensi memarginalkan LKM. Sementara, mayoritas UMK akan tetap menghadapi pembatasan kredit oleh perbankan. Menurut saya, kontradiksi ini muncul akibat konflik kepentingan antara tujuan korporasi perbankan dengan tujuan pemberdayaan LKM (seperti dijelaskan pada Gambar 2).



Keterangan: π adalah nilai tambah sektor keuangan

Sumber: Nugroho (2020)

Gambar 2. Kontradiksi antara Kepentingan Korporasi Perbankan dan LKM dalam Inklusivitas Keuangan

Gambar 2 dikonstruksikan sebagai berikut: *Pertama,* sumbu vertikal menunjukkan nilai tambah sektor keuangan sepenuhnya terdistribusi pada korporasi perbankan, dan sebaliknya, sumbu horisontal kepada LKM. Selanjutnya, garis (OX) dan (OY) menunjukkan batas relatif distribusi nilai tambah sehingga distribusi nilai tambah akan selalu bergerak dinamis sepanjang (XY), *sebagai*

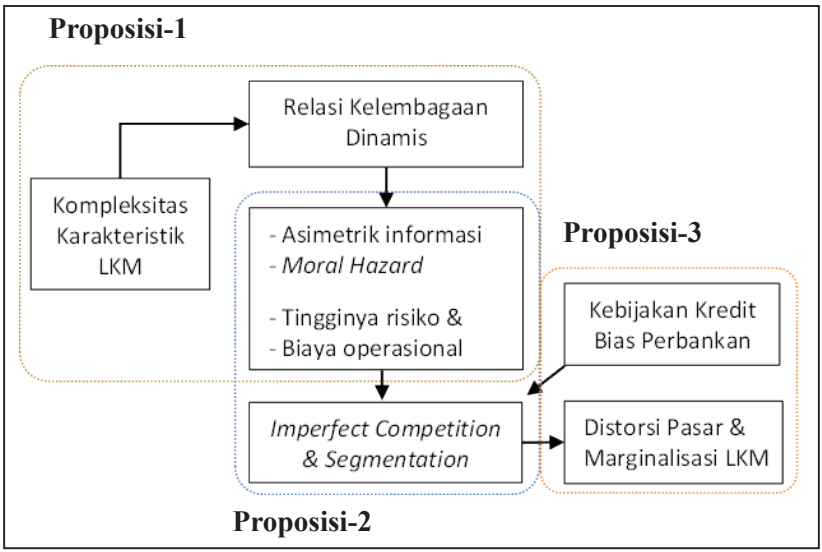
kurva benefit sosial-ekonomi dari bisnis keuangan. Kedua, dalam kerangka ini, tiga pilihan kebijakan dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator dengan implikasi yang berbeda, yaitu: (1) strategi liberalisasi, (2) strategi persaingan terkendali (segmentasi) dan (3) strategi pengendalian represif.

Pilihan strategi liberalisasi menekankan pola persaingan mutlak di pasar keuangan mikro. Implikasinya, strategi ini akan medorong eksklusivitas keuangan (XA). Sebaliknya, strategi pengendalian penuh menekankan intervensi langsung pemerintah melalui penciptaan kelembagaan atau instrumen keuangan untuk menjangkau UMK. Pilihan kebijakan ini secara diagramatis berada sepanjang garis (YB) yang berimplikasi adanya distorsi pasar secara substansial. Pada konteks Indonesia, kebijakan seperti ini dapat merujuk pada program kredit Bimas, KUT dan/atau KUR.

Ketiga, pilihan strategi persaingan terkendali (segmentasi) yang berimplikasi pada pergerakan sepanjang garis (AB), dimana intervensi pemerintah diperlukan untuk mendorong efisiensi melalui segmentasi persaingan antara perbankan dan LKM. Secara teoretis, strategi segmentasi persaingan mungkin yang paling relevan karena dapat memperkuat kolaborasi antara perbankan dan LKM dalam menjangkau UMK (Thabit & Mardini, 2016; Cozarenco, 2015; Isern & Porteus, 2005).

Sebagai rangkuman, Gambar 3 menunjukkan keterkaitan antar proposisi yang saya kembangkan untuk memahami secara komprehensif program kredit mikro dalam konteks kompleksitas karakteristik keuangan mikro. Menurut pandangan saya, aspek kompleksitas ini belum menjadi fokus utama dalam diskursus keuangan mikro, baik oleh pendekatan pasar barang, pasar uang maupun arus utama pendekatan komersialisasi kredit mikro. Merujuk Gambar 3, aspek kompleksitas karakteristik keuangan mikro sangat kritikal karena menyebabkan pola relasi kelembagaan yang dinamis.

Dinamika relasi kelembagaan ini terjadi dimana konflik-harmonis, sinergi-kontradiksi dan kooperatif-kompetisi saling berkelindan akibat ketidakterpisahan antara dimensi sosio ekonomi dan budaya, baik di tingkat LKM maupun UMK sebagai pengguna. Konsekuensinya, penyaluran kredit mikro sangat sensitif terhadap informasi asimetris dan moral hazard yang termanifestasikan pada besarnya risiko dan biaya operasional kredit mikro (Proposisi-1).



Gambar 3. Keterkaitan Antarproposisi

Dalam kerangka ini, persaingan pasar akan cenderung tersegmentasi karena masing-masing LKM memiliki kapasitas bisnis, lokasi operasional, dan target pelanggan yang berbeda dalam merespon tingginya risiko dan biaya penyaluran kredit mikro (Proposisi-2). Selanjutnya, dalam pola persaingan yang tersegmentasi ini, strategi penyaluran program kredit mikro yang bias perbankan akan cenderung distortif atau berimplikasi pada persaingan yang tidak sehat dan berpotensi memarginalkan LKM lainnya (Proposisi-3).

BAB III. KONTRIBUSI EMPIRIS

Pada bab sebelumnya telah diuraikan justifikasi teoretis terhadap tiga proposisi yang saya ajukan. Secara simultan, ketiga proposisi ini disebutkan bahwa prinsip kompleksitas dalam karakteristik keuangan mikro merefleksikan relasi kelembagaan yang dinamis (Proposisi-1: Prinsip kompleksitas karakteristik) sehingga pola persaingan cenderung tersegmentasi (Proposisi-2: Prinsip persaingan tersegmentasi); dan konsekuensinya, kebijakan liberalisasi yang bias perbankan akan berimplikasi pada persaingan yang tidak sehat dan berpotensi memarginalkan LKM (Proposisi-3: Prinsip kontradiksi). Bab ini menguraikan beberapa penelitian yang telah dilakukan selama tahun 2005-2025 untuk menguji ketiga proposisi ini. Namun demikian, subbab berikut akan menguraikan terlebih dahulu evolusi program kredit mikro di Indonesia.

3.1 Evolusi Program Kredit Mikro di Indonesia

Untuk menguji dinamika kelembagaan keuangan mikro, saya telah melakukan serangkaian penelitian terkait perjalan panjang program kredit mikro mencakup program kredit mikro pada Era Kolonial hingga sekarang, mencakup Program Bimas, Program KUT, dan Program KUR (Nugroho, 2009; 2014 & 2018). Serta, studi terkait program Simpan-pinjam perempuan (SPP)-PNPM Mandiri (Nugroho et al. 2011), Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) untuk Koperasi dan beberapa program kredit mikro oleh Pemda (Nugroho et al. 2014 & 2017; Ismail & Nugroho et al. 2014).

Secara umum hasil penelitian tersebut dapat disintesakan sebagai berikut: *Pertama,* dualitas kelembagaan keuangan mikro, LKM

berbasis perbankan dan LKM berbasis koperasi (sekarang dikenal sebagai koperasi simpan-pinjam/KSP) memiliki akar pengembangan sejak Era Kolonial (Gambar 4). LKM berbentuk perbankan, seperti BRI-unit dan BPR berakar dari bank kerakyatan *(Algemene Volkscredietbank/AVB)* pada Era Kolonial. Sedangkan, LKM berbasis koperasi berakar dari kelembagaan 'lumbung desa'.

Desain awal LKM pedesaan di Era Kolonial berbentuk koperasi, dimana lumbung desa diharapkan menjadi koperasi kredit primer *(first-tier)*. Sementara itu, bank kerakyatan sebagai koperasi kredit sekundernya *(second-tier)*. Sedangkan 'Central Kas' berfungsi sebagai lembaga pembina dan sebagai pusat keuangan (Djoyohadikusumo, 1989 [1943]). Artinya, kelembagaan AVB adalah transformasi dari bank kerakyatan yang fokus pada penyediaan kredit mikro untuk petani dan pedagang kecil.



Sumber: Nugroho (2018)

Gambar 4. Evolusi Program Kredit Mikro di Indonesia

Namun, dalam perkembangannya, banyak lumbung desa yang ditutup, terutama akibat adanya Depresi Ekonomi tahun 1930an, dan menempatkan dananya pada bank rakyat dan bank desa. Hal ini menyebabkan transformasi sistem keuangan perdesaan yang tidak lagi berbasis pada lumbung desa/koperasi tetapi sistem perbankan skala kecil (Robinson, 2001).

Sejarah bank kerakyatan bermula dari pendirian *De Poerwokertosche hulp en spaarbank der inlandsche hoofden* atau 'bank simpanan kaum priyayi Purwokerto' tahun 1895. Pada tahun 1900s, bank skala kecil *(Afdeelingsbank/district bank),* bank kredit rakyat *(Algemene Volkscredietbank/AVB)* dan lumbung desa banyak diinisiasi di Jawa dan Madura. Menurut Djoyohadikusumo (1989 [1943]), sebelum lahirnya AVB tahun 1934, lembaga perkreditan rakyat mencakup lumbung desa, bank desa dan bank kredit rakyat *(volkscredietbank)*. Sampai tahun 1937, kinerja bank kerrakyatan ini cukup signifikan dengan penyaluran kredit mencapai 24,9 juta gulden dengan tingkat bunga sekitar 15-18% per tahun dan kredit macet sekitar 3,0% (Djoyohadikusumo (1989[1943]).

Di Era Orde Baru, pemerintah lebih fokus pada pengembangan perbankan mikro, terutama BRI-unit, sementara LKM berbentuk koperasi relatif terabaikan. Koperasi hanya sebatas 'instrumen politik' penyaluran kredit murah tetapi belum pernah dikembangkan menjadi entitas bisnis keuangan mikro yang berdaya saing, akuntabel dan kredibel (Nugroho, 2009). Bahkan, dalam perkembangannya, operasional koperasi banyak diwarnai dengan berbagai isu korupsi, manipulasi dan penyelewengan sehingga menghilangkan kredibilitasnya di masyarakat (Nugroho, 20017).

Kedua, implementasi beragam program kredit mikro sejak Era Kolonial hingga sekarang berpola kredit murah bersubsidi (Gambar 4). Menurut saya, distorsi pasar keuangan mikro secara signifikan terjadi sejak Era Baru, pada saat pemerintah menginisiasi Program

Bimas tahun 1969. Distorsi pasar dilakukan melalui penyaluran kredit murah oleh BRI-unit desa. Meskipun program kredit Bimas mampu mewujudkan swasembada beras tahun 1984, tetapi kredit macet program ini sangat besar. Tingkat pengembalian kredit Bimas hanya sekitar 46,9% pada tahun 1983/84. Selama 1970-1980 tingkat bunga kredit Bimas dipatok sebesar 12% per tahun. Dengan inflasi rata-rata sekitar 13,5% selama 1970-1985, tingkat bunga riil adalah negatif. Konsekuensinya, mayoritas BRI-unit desa (86,4%) mengalami kerugian dalam penyaluran kredit Bimas. Pada tahun 1985, program Bimas dihentikan dan sebagai gantinya diluncurkan Program Kredit Usaha Tani (KUT). Program KUT ini juga menghadapi masalah yang sama yaitu tingginya kredit macet (Nugroho, 2017).

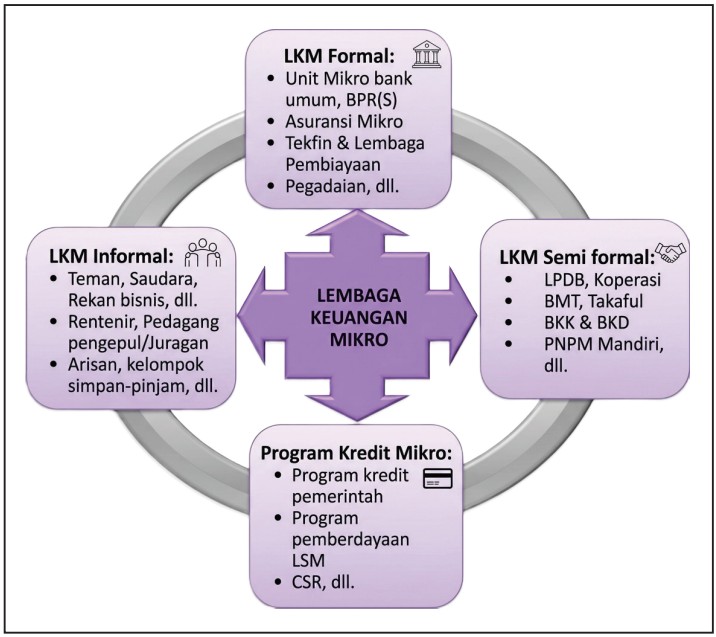
Dalam relasi kelembagaan yang bersifat dominansi negara, kebijakan pemerintah cenderung represif terhadap pasar kredit mikro, baik melalui pengendalian tingkat bunga dan mekanisme penyaluran kredit program. Dampaknya adalah kegagalan kredit program dilihat dari tingginya kredit macet, kerugian operasional bagi lembaga penyalur (BRI-unit desa dan KUD pada era 1970/80an), dan tidak ada tendensi pemberdayaan untuk penguatan bisnis LKM (Nugroho, 2017). Implikasinya, pola relasi yang represif ini tidak mampu meningkatan penyaluran kredit yang berkualitas kepada UMK. Sementara, penguatan tata kelola bisnis LKM, terutama koperasi relatif terabaikan.

Pada Era Reformasi, berbagai program kredit mikro disalurkan dengan pola yang tidak jauh berbeda. Program kredit mikro seperti KUR, KKPE, PUAP, LPDB dan berbagai program kredit mikro oleh Pemda masih cenderung represif terhadap pasar kredit mikro. Hal ini dapat dilihat dari strategi subsidi kredit dan penetapan tingkat bunga jauh dibawah bunga pasar. Seperti pengalaman sebelumnya, mayoritas program kredit ini menghadapi masalah kredit macet (Saptia & Nugroho, 2017; Nugroho, 2017; 2020).

Menurut pendapat saya, meskipun terjadi ekspansi program KUR yang signifikan melalui pola penjaminan dan subsidi bunga, program ini hanya memperkuat penetrasi perbankan di pasar keuangan mikro. Bahkan, ekspansi KUR berpotensi memarginalkan LKM lainnya. Program KUR juga belum mampu menjangkau UMK, terutama kelompok *unbankable*. Sementara, produksi dan produktivitas UKM juga belum terdampak signifikan akibat penyalurannya ang terkonsentrasi pada sektor perdagangan. Singkatnya, program kredit di Era Reformasi pun hanya fokus pada kredit murah, dan belum sebagai suatu strategi pemberdayaan LKM dalam mendukung pembiayaan UMK (Nugroho et al. 2016).

3.2 Prinsip Kompleksitas Karakteristik dan Segmentasi Pasar Keuangan Mikro: Uji Empiris Proposisi-1 dan Proposisi-2

Untuk menguji Proposisi-1: prinsip kompleksitas dalam karakteristik keuangan mikro, pada awalnya saya melakukan penelitian di Jawa Tengah sebagai bagian dari desertasi doktoral di Curtin University. Selanjutnya saya perdalam lagi melalui serangkaian penelitian di beberapa propinsi selama tahun 2010-2015 (Nugroho et al. 2010; Nugroho et al. 2013; 2014; Saptia & Nugroho, 2015; 2016). Dari penelitian tersebut, kompleksitas karakteristik keuangan mikro di Indonesia dapat disederhanakan menjadi empat subsistem (Gambar 5). *Pertama,* subsistem formal yaitu LKM yang operasionalnya dibawah pengawasan otoritas keuangan (OJK dan BI), seperti BRI-unit, unit mikro perbankan, usaha pegadaian, BPR, BPRS, modal ventura, platform *fintech,* dan lain sebagainya.



Sumber: Nugroho (2009)

Gambar 5. Karakteristik Keberagaman Pelaku dalam Keuangan Mikro di Indonesia

Karakteristik utama dalam kelompok LKM formal antara lain adalah orientasi sepenuhnya pada profitabilitas, ketentuan agunan fisik dan prosedur formal sehingga secara operasional jauh dari kebiasaan sosial masyarakat kecil dan UMK. Ketentuan agunan fisik ini esensinya sebagai implikasi dari keterbatasan perbankan untuk memecahkan masalah informasi asimetris. Sementara itu, pada umumnya orientasi bisnis dari LKM kelompok ini adalah percampuran antara tujuan komersial dan misi sosial. Tata kelola yang baik yang dikaitkan dengan jejaring dan agunan sosial dapat tumbuh dalam skala besar dengan kredit macet yang rendah, seperti KSP-Sidogiri di Pasuruan dan Kospin di Pekalongan (Nugroho, 2010; Nugroho et al. 2019).

Kedua, subsistem semi-formal yaitu LKM yang operasionalnya tidak diatur atau disupervisi oleh otoritas keuangan tetapi oleh lembaga pemerintah lainnya. Pelaku LKM ini cukup beragam terutama adalah koperasi simpan-pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), KSP syariah, BKD, BKK, Bumdes dengan unit simpan pinjam dan lain sebagainya.

Ketiga, subsistem LKM informal yang operasionalnya tidak diatur oleh otoritas keuangan maupun pemerintah tetapi tunduk pada norma sosial dan/atau hukum adat. Praktik bisnis LKM informal ini mencakup kegiatan pinjam-meminjam antar saudara, tetangga atau rekan kerja, rentenir, juragan/pengepul yang memberikan kredit *(gadoh, gadai)*, arisan, kelompok simpan pinjam keagamaan, lembaga simpan-pinjam desa adat di Bali dan lain sebagainya. Pada umumnya, kredit macet dalam kelembagaan ini relatif rendah karena operasionalnya yang dekat dengan kebiasaan atau jejaring sosial di masyarakat (Nugroho, 2009).

Keempat adalah subsistem program kredit mikro oleh pemerintah dan LSM, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan lain sebagainya. Program kredit mikro pada umumnya menjadi bagian dari misi pemberdayaan masyarakat atau UMK oleh lembaga pemerintah, LSM dan program CSR korporasi. Kredit macet program ini biasanya tinggi karena lebih menekankan misi pemberdayaan sosial (Nugroho et al. 2013; 2014; Saptia & Nugroho, 2016).

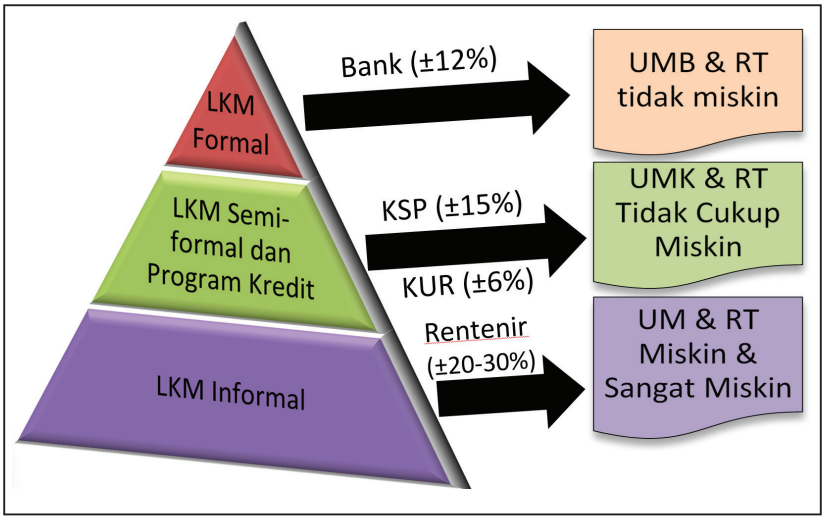
Fakta empiris di atas menjustifikasi Proposisi-1 bahwa dalam kompleksitas karakteristik kompleksitas pola relasi kelembagaan akan cenderung dinamis karena terkait dengan keberagaman pelaku dengan perilaku bisnis yang berbeda-beda. Hal ini sebagai respons atas variabilitas UMK sebagai target pasar, keberagaman motif dalam memanfaatkan layanan keuangan, dan besarnya pengaruh faktor sosial-budaya dan ekonomi dalam praktik bisnis LKM.

Selanjutnya, untuk menguji Proposisi-2 bahwa kompleksitas karakteristik kelembagaan keuangan mikro berkaitan dengan segmentasi pasar, saya memperdalam analisis dengan mengurai keberagaman target pasar oleh masing-masing subsistem LKM. Temuan penting dari analisis tersebut mengkonfirmasi adanya segmentasi pasar melalui spesialisasi masing-masing subsistem ini, seperti diuraikan di Gambar 6. Pada umumnya, subsistem LKM formal, seperti perbankan cenderung memfokuskan penyaluran kreditnya kepada UMB dan/atau rumah tangga non-miskin.

Sementara, LKM semi-formal seperti koperasi lebih fokus pada UMK dan rumah tangga tidak cukup miskin, dan LKM informal seperti rentenir dan pedagang pada kelompok usaha mikro (UM) dan rumah tangga miskin dan sangat miskin. Rumah tangga tidak cukup miskin ini didefinisikan memiliki pendapatan 25% di atas garis kemiskinan, dan rumah tangga sangat miskin memiliki pendapatan 25% dibawah garis kemiskinan. Namun demikian, target pengguna subsistem program kredit mencakup bukan hanya kelompok UMK dan rumah tangga miskin atau sangat miskin, tetapi juga kelompok usaha menengah dan rumah tangga non-miskin (Nugroho, 2009; Nugroho et al. 2014; Saptia & Nugroho, 2015).

Merujuk Proposisi-2, pertanyaannya adalah bagaimana spesialisasi LKM pada target pasar ini merefleksikan persaingan yang tersegmentasi? Segmentasi persaingan ini secara empiris dimanifestasikan oleh variabilitas tingkat bunga dalam satu wilayah. Hal ini didukung oleh fakta empiris bahwa beragam intervensi kredit program dengan bunga rendah tidak otomatis menurunkan tingkat bunga pasar. Penelitian saya di Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa dalam suatu lokasi tingkat bunga kredit cenderung sangat bervariasi, dimana bunga kredit perbankan berkisar 12-13%, sementara bunga kredit koperasi antara 15-20% per tahun. Sedangkan, tingat bunga kredit dari rentenir atau pedagang pengepul bisa mencapai di atas 25% per tahun. Pada

umumnya, kredit program ditetapkan 50% di bawah bunga kredit perbankan, atau sekitar 5-6% per tahun (Septia & Nugroho, 2016).



Sumber: Nugroho (2009; 2016).

Gambar 6. Spesialisasi LKM Menurut Segmen Penggunanya

Tingkat bunga kredit dalam suatu wilayah sangat bervariasi menurut pelaku LKM, pengguna atau pemanfaatannya. Artinya, segmentasi pasar ini secara teoretis mengkonfirmasi pola persaingan yang tidak sempurna *(imperfect competition)* dalam keuangan mikro, atau tendensi adanya *multiple equilibria*, bukan *single equlibria* di pasar keuangan mikro.

Segmentasi persaingan ini terjadi karena masing-masing pelaku LKM akan mempertahankan segmen pasarnya dengan memperkuat loyalitas nasabah melalui berbagai cara. Misalnya, kontrak kredit dikaitkan dengan perdagangan *(trade-credit linkage)*, norma kekerabatan dan resiprositas, ketentuan agama atau adat, dan ikatan

jejaring kelompok *(group bounding)*. Berkembangnya skema kredit mikro di berbagai desa adat di Bali, dan KSP-syariah Sidogiri di Pasuruan adalah fakta empiris yang saya temukan terkait penguatan loyalitas berbasis modal sosial. *Fakta empiris ini mengkonfirmasi Proposisi-2 bahwa dalam kompleksitas karakteristik keuangan mikro, adanya relasi kelembagaan yang dinamis berimplikasi pada pola persaingan yang tersegmentasi.*

Studi saya juga mempertegas bahwa relasi kelembagaan yang dinamis ini terkait dengan pentingnya aspek modal sosial dalam keuangan mikro. Loyalitas nasabah misalnya, dapat terbangun karena pemanfaatan keuangan mikro lebih mendasarkan pada dimensi non-komersial, seperti norma kekerabatan, resiprositas dan adat/agama. Fakta empiris juga saya temukan bahwa UMK mampu mengakses kredit dari berbagai sumber karena memiliki jejaring sosial dan bisnis yang luas (Saptia & Nugroho, 2017; Nugroho et al. 2013).

3.3 Marginalisasi LKM Pada Kerangka Makroekonomi: Uji Empiris Proposisi-3

Bagian ini akan menguji secara empiris Proposisi-3*,* bahwa pada kerangka makro, dalam pola relasi antar kelembagaan yang dinamis, kebijakan liberalisasi yang bias pada perbankan menyebabkan proses marginalisasi LKM. Proposisi-3 ini menunjukkan adanya prinsip kontradiksi dalam program kredit mikro yang bias perbankan dengan marginalisasi LKM.

Pengujian empiris atas Proposisi-3 ini saya lakukan cukup mendalam karena esensinya merupakan implikasi dari Proposisi-1 dan Proposisi-2. Dua area yang menjadi fokus pengujian empiris, yaitu: struktur pasar keuangan dan dinamika program kredit sebagai manifestasi kebijakan yang bias perbankan berpotensi memarginalkan LKM. Menurut saya, salah satu bentuk kegagalan pemerintah sebagai regulator dapat dicermati dari serangkaian kebijakan yang bias pada

perbankan. Proses ini terjadi secara terus menerus dan akumulatif sehingga berdampak pada proses marginalisasi LKM. Salah satu indikasinya adalah terjadinya stagnasi kemampuan bisnis LKM dan kelangkaan kredit UMK dalam jangka panjang.

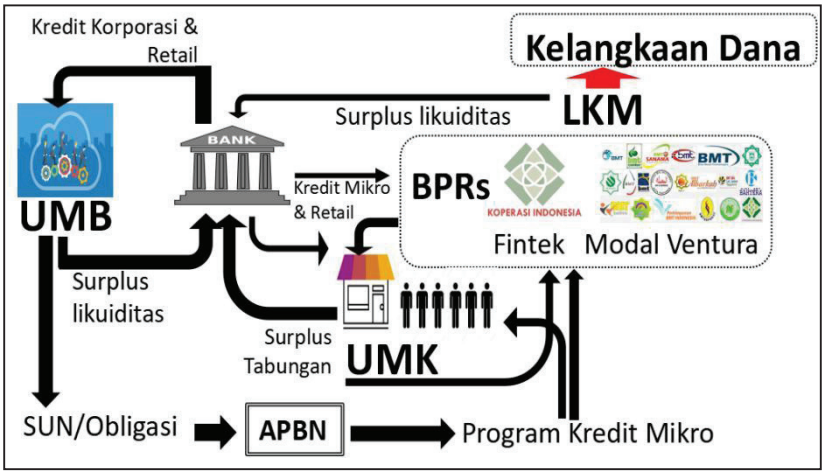
Untuk menguji Proposisi-3 ini, saya melakukan serangkaian penelitian sepanjang tahun 2015-1917 terkait LKM-nonbank. Studi ini menemukan tiga fakta penting. *Pertama,* serangkaian deregulasi perbankan merefleksikan kebijakan liberalisasi yang bias pada korporasi perbankan. Akibatnya, kekuatan bisnis perbankan tumbuh menjadi sangat dominan dibanding lembaga keuangan non-bank lainnya.

Kedua, modernisasi BRI-unit sejak tahun 1980 an di satu sisi telah menjadikan BRI sebagai entitas perbankan dengan jejaring unit mikro yang sangat luas. Namun di sisi lain, mayoritas LKM, termasuk BPR dan BPRs serta koperasi menghadapi stagnasi kemampuan bisnis. LKM ini secara kuantitatif besar tetapi mayoritas memiliki kapabilitas dan kapasitas bisnis yang rendah dan stagnan.

Ketiga, ironisnya dalam jangka panjang, alokasi kredit perbankan pada UMK tidak pernah lebih dari 20% dari total kredit perbankan. Maknanya, ditengah modernisasi perbankan, UMK secara persisten menghadapi kelangkaan kredit. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana proses marginalisasi LKM dapat terjadi?

Gambar 7 menunjukkan bagaimana dominasi perbankan berdampak pada proses marginalisasi LKM dan UMK. Menurut saya, dua faktor menyebabkan proses ini terjadi (Nugroho, 2017; Nugroho et al. 2019; Pawestri & Nugroho, 2014): *Pertama,* penempatan surplus likuiditas masyarakat dan dunia usaha pada perbankan. Sementara, perbankan cenderung menempatkan kelebihan likuiditasnya dalam bentuk kredit korporasi kepada UMB dan/atau surat utang atau obligasi negara (SUN). Akibatnya, LKM akan menghadapi kelangkaan likuiditas secara persisten karena ketidakmampunya memobilisasi

tabungan masyarakat. Implikasinya, tingkat bunga kredit oleh LKM akan tinggi karena pembiayaan kreditnya bersumber dari perbankan. Keterbatasan dana dan tingginya tingkat bunga kredit ini kemudian secara kausalitas menyebabkan migrasi debitur LKM ke perbankan, terutama debitur UMK yang prospektif dan membutuhkan skala kredit yang lebih besar (Nugroho, 2019).



Sumber: Nugroho (2019)

Gambar 7. Dominasi Perbankan dan Marginalisasi LKM

Kedua, ironisnya dari sisi kebijakan, perbankan mendapatkan dukungan lembaga penjamin simpanan (LPS), sementara LKM-non bank seperti koperasi sulit mendapatkan kepercayaan masyarakat karena ketiadaan lembaga sejenis. Konsekuensinya adalah (1) ketidakmampuan LKM memobilisasi tabungan masyarakat dan (2) ketergantungan sumber pembiayaan LKM pada kredit perbankan. Dalam kondisi kelangkaan likuiditas ini, pangsa LKM akan semakin tergerus akibat implementasi program kredit bersubsidi yang disalurkan melalui perbankan.

Strategi kebijakan ini mendistorsi pasar kredit mikro secara signifikan karena berimplikasi pada persaingan yang tidak sehat bagi LKM. Artinya, pemerintah melakukan 'kebijakan represif' terhadap LKM melalui perbankan yang berimplikasi pada stagnasi bisnis LKM (Nugroho et al. 2019). Survey BPS tahun 2018 menunjukkan, rata-rata aset koperasi simpan pinjam hanya sekitar Rp 6,8 milyar (BPS 2019). Rata-rata aset KSP ini jauh dibawah BPR yang mencapai 84,9 milyar (OJK 2019). Berdasarkan analisis ini, saya cukup berkeyakinan bahwa fakta empiris menjastifikasi Proposisi-3. Dengan demikian, dalam kompleksitas karakteristik dimana terjadi pola relasi kelembagaan yang dinamis dan segmentasi persaingan, *kebijakan liberalisasi yang bias perbankan melalui penyaluran program kredit bersubsidi oleh korporasi perbankan akan cenderung distortif, dan berpotensi menyebabkan proses marginalisasi LKM*.

BAB IV. KONTRIBUSI ILMIAH

Merujuk pada proposisi teoretis dan pengujian empiris atas ketiga proposisi tersebut, naskah orasi memiliki kontribusi ilmiah sebagai berikut: *Pertama,* fakta empiris Proposisi-1 bahwa kompleksitas karakteristik bisnis LKM mengkonfirmasi relevansi paradigma pasar keuangan dalam memahami ekosistem keuangan mikro (Geleta, 2015). Namun demikian, studi-studi berbasis paradigma pasar uang hanya fokus pada aspek informasi asimetris yang berkaitan dengan kinerja finansial dan bisnis, misalnya ketidakcukupan agunan fisik, dan kinerja bisnis UMK. Menurut pandangan saya, masalah asimetris informasi ini tidak hanya mencakup aspek kinerja bisnis dan keuangan UMK tetapi juga pola relasi kelembagaan yang dinamis yang terkait dengan ketidak-terpisahan antara perilaku sosial-budaya dan ekonomi baik pada tataran LKM maupun UMK.

Lebih jauh lagi, uji empiris atas prinsip kompleksitas mengelaborasi studi Stiglitz & Weis (1981) bahwa problema asimetris informasi dan *moral hazard* secara inheren muncul dalam praktik keuangan mikro. Berbeda dengan studi ini yang secara spesifik fokus pada aspek ketidakmampuan bank dalam memvaluasi secara presisi kinerja bisnis UMK, menurut saya, masalah asimetrik informasi ini terkait erat dengan kompleksitas yang berdimensi lebih luas, mencakup perilaku sosio ekonomi dan budaya UMK yang berimplikasi pada besarnya risiko dan biaya penyaluran kredit mikro. Hal ini termanifestasikan pada tingkat bunga kredit yang tinggi dan bervariasi menurut sektor, lokasi ataupun skala bisnis UMK. Maknanya, implementasi program kredit dengan bunga rendah (bersubsidi) akan tetap sulit menurunkan tingkat bunga di pasar keuangan mikro.

Kedua, uji empiris atas Proposisi-2 ini mengelaborasi studi Aleem (1993) dan Hoff & Stiglitz (1997), bahwa pasar keuangan mikro

memiliki pola persaingan yang tersegmentasi. Menurut kedua studi ini, segmentasi ini terjadi karena pola penyaluran kredit oleh rentenir yang dikaitkan dengan kontrak produksi dan/atau perdagangan *(trade-credit linkage)*. Menurut pendapat saya, segmentasi terjadi karena masing-masing pelaku LKM memiliki strategi yang berbeda dalam merespon kompleksitas karakteristik keuangan mikro. Bagi perbankan, penyaluran kredit akan lebih diprioritaskan pada segmen pelaku usaha menengah dan besar (UMB) dengan tingkat bunga yang relatif rendah, rigid dan beragunan fisik. Sementara, pelaku LKM, seperti KSP akan lebih fokus pada UMK melalui penyaluran kredit secara informal dan tanpa agunan dengan bunga yang tinggi. Biaya operasionalnya akan besar karena untuk memperkuat loyalitas, seperti kunjungan ke rumah/tempat usaha, atau kegiatan sosial oleh nasabah.

Ketiga, uji empiris Proposisi-3 secara tegas mengkritisi pendekatan komersial (Charitonenko et al. 2004), dimana penyaluran program kredit melalui perbankan akan memperluas jangkauannya pada UMK. Sebaliknya, saya temukan fakta empiris di Indonesia, bahwa pendekatan ini justru akan mendistorsi pasar keuangan mikro, dan berpotensi memarginalkan LKM. Maknanya, program kredit mikro melalui pendekatan komersial yang bias perbankan akan sulit menciptakan ekosistem yang kondusif bagi penguatan kapasitas bisnis LKM. Dalam kerangka ini, studi keuangan mikro harus memperhatikan tiga prinsip utama, yaitu (1) prinsip kompleksitas karakteristik, (2) prinsip segmentasi persaingan, dan (3) prinsip kontradiksi, dimana desain program kredit mikro yang bias perbankan berimplikasi pada persaingan yang tidak sehat, dan berpotensi memarginalkan LKM.

BAB V. KONTRIBUSI UMUM

Mencermati fakta empiris dari ketiga proposisi yang telah saya uraikan, empat (4) rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan dari naskah orasi. *Pertama,* merujuk pada pentingnya aspek kompleksitas karakteristik kelembagaan LKM, rekomendasi umum yang diajukan adalah bahwa industri keuangan mikro harus dimaknai sebagai suatu ekosistem yang menyatu dengan sistem keuangan nasional, yang fokus pada pembiayaan UMK. Maknanya, kolaborasi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dengan OJK sangat kritikal dalam penguatan tata kelola bisnis LKM yang sejalan dengan penguatan sistem perbankan nasional. Dalam konteks ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus juga mencakup penjaminan simpanan untuk LKM, bukan hanya perbankan. Sementara, kerjasama antara Kementerian Koperasi, asosiasi bisnis, organisasi profesi dan akademisi berperan dalam memperkuat model bisnis dan tata kelola yang baik *(good governance)* bagi pelaku KSP melalui berbagai pelatihan manajerial, literasi keuangan dan penyusunan SOP pengawasan dan manajemen risiko.

Kedua, prioritas kebijakan yang menekankan perbankan sebagai penyalur kredit program, terutama program KUR harus dikaji ulang karena berpotensi menciptakan pola persaingan tidak sehat bagi LKM. Oleh karena itu, Kemenko Ekonomi dan Kementerian Keuangan harus memperluas keterlibatan pelaku LKM dalam penyaluran kredit program, terutama KUR untuk menjangkau segmen usaha mikro. Segmentasi ini juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi operasional antara perbankan dengan LKM untuk menjangkau lebih banyak UMK. Desain program kredit mikro yang berbasis kolaborasi antara perbankan dan LKM berpotensi memperkuat ekosistem keuangan mikro secara berkelanjutan.

Ketiga, kolaborasi antara Kemenko Ekonomi, OJK dan Kementerian Keuangan sebaiknya mendesain ulang program KUR, dimana indek kinerja utama (IKU) bukan hanya untuk peningkatan akses pembiayaan tetapi juga penguatan kemampuan bisnis LKM. Dalam kerangka ini, kerjasama dengan akademisi dan praktisi/asosiasi bisnis diperkuat untuk mendukung berbagai program pelatihan teknis, manajerial dan penguatan kewirausahaan bagi UMK dan pelaku LKM.

Keempat, untuk pengembangan teori ekonomi keuangan mikro, penelitian ke depan sebaiknya difokuskan pada penggunaan paradigma pasar barang yang dikaitkan dengan pasar keuangan mikro, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin intensif oleh UMK dan LKM, seperti sosial media, *e-commerce, fintech* dan *digital payment (QRIS)*. Hal ini penting untuk memperkuat fakta empiris bahwa intensitas pemanfaatan teknologi digital ini memperkuat inovasi bisnis dan kewirausahaan, serta berpotensi memecahkan masalah informasi asimetris dan *moral hazard* dalam intermediasi keuangan mikro kepada UMK.

BAB VI. KESIMPULAN

Dari proposisi teoretis dan uji empiris yang telah dilakukan, kesimpulan berikut dapat saya kemukakan sebagai kebaruan diskursus keuangan mikro pada konteks Indonesia. *Pertama,* fakta empiris Proposisi-1 mempertegas bahwa kompleksitas dalam karakteristik kelembagaan memiliki implikasi teoretis yang signifikan. Kompleksitas ini belum dimaknai penting oleh paradigma pasar uang dan implikasinya terhadap masalah informasi asimetris dan *moral hazard*. Menurut pandangan saya, kompleksitas karakteristik berpengaruh signifikan pada kedua masalah tersebut karena berkaitan erat dengan perbedaan kapasitas, kapabilitas dan strategi bisnis antar pelaku LKM dalam merespon keberagaman perilaku, motivasi dan ketidak-terpisahan antara aspek sosio ekonomi dan budaya dalam pemanfaatan keuangan mikro oleh UMK.

Dalam kerangka inilah, pasar keuangan mikro memiliki kompleksitas karakteristik yang unik yang berimplikasi pada besarnya risiko dan biaya operasional, spesialisasi pasar, fragmentasi operasional, disparitas tingkat bunga, dan pentingnya aspek sosial-budaya dalam bisnis LKM.

Kedua, dari uji empiris Proposisi-2, dalam kompleksitas dan pola relasi kelembagaan yang dinamis, persaingan pasar secara teoretis akan cenderung tersegmentasi. Atau terjadi persaingan tidak sempurna *(imperfect competition)* yang berimplikasi pada *multi-equilibria* di pasar keuangan mikro. Dalam kerangka ini, tingkat bunga, target pasar dan mekanisme pelayanan akan sangat beragam, terspesialisasi pada segmen pelanggan tertentu *(niche market)* dan bersifat lokal spesifik.

Ketiga, mencermati Proposisi-1 dan Proposisi-2, uji empiris Proposisi-3 mempertegas bahwa kebijakan liberalisasi pasar keuangan

melalui penyaluran program kredit bersubsidi via perbankan akan cenderung distortif, dan berimplikasi pada pola persaingan yang tidak sehat. Hal ini karena pola penyaluran kredit bersubsidi ini memperkuat penetrasi perbankan pada pasar keuangan mikro sehingga berpotensi memarginalkan LKM.

Dari kerangka teoretis dan uji empiris atas ketiga proposisi di atas, sintesa kebaruan teoretis yang dapat kami kemukakan, bahwa: (1) prinsip kompleksitas karakteristik merefleksikan pola relasi kelembagaan yang dinamis, dan berimplikasi pada masalah informasi asimetris dan moral hazard di pasar keuangan mikro. (2) Interaksi antar kedua faktor ini akan berimplikasi pada segmentasi persaingan karena masing-masing LKM memiliki strategi, kapasitas bisnis dan fokus pasar yang berbeda dalam merespon besarnya risiko dan biaya operasional dalam penyaluran kredit mikro. (3) Dalam persaingan yang tersegmentasi, kebijakan penyaluran kredit bersubsidi melalui perbankan akan cenderung distortif dan berpotensi memarginalkan LKM.

Implikasi kebijakan yang penting dari ketiga proposisi ini adalah bahwa implementasi program kredit mikro yang bias perbankan, seperti program KUR harus didesain secara hati-hati karena berpotensi memarginalkan LKM. Oleh karena itu, Pelaksanaan program kredit mikro harus dimaknai bukan hanya untuk menyediakan kredit murah kepada UMK tetapi juga untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas bisnis berbagai LKM dalam melayani UMK.

BAB VII. PENUTUP

Berdasarkan review teoretis dan justifikasi empiris atas tiga proposisi, saya berani menegaskan nilai kebaruan pada tiga aspek. *Pertama,* kompleksitas karakteristik bisnis keuangan mikro memiliki implikasi teoretis pada pola relasi antar kelembagaan yang bersifat dinamis-kontradiksi bukan statis-harmonis, dan struktur persaingan pasar yang tersegmentasi. Dengan demikian, prinsip kompleksitas ini secara teoretis harus dimaknai sebagai faktor penting mengapa masalah informasi asimetris dan moral hazard berpengaruh pada besarnya risiko dan biaya operasional penyaluran kredit mikro kepada UMK.

Nilai kebaruan *kedua* adalah dalam pola persaingan yang tersegmentasi, saya menegaskan bahwa implementasi program kredit bersubsidi memiliki dimensi kontradiksi dimana distorsi pasar berimplikasi pada persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu, dalam kompleksitas karakteristik dan dinamika relasi kelembagaan, strategi liberalisasi pasar yang bias perbankan berpotensi memarginalkan pelaku LKM. Bila hal ini terjadi maka stagnasi bisnis LKM akan secara persisten menyebabkan kelangkaan kredit *(scarcity credit)* bagi UMK.

Ketiga, implikasinya, pelaksanaan program kredit mikro harus didesain, bukan hanya untuk peningkatan akses pembiayaan yang murah, tetapi juga penguatan kompetensi bisnis LKM, dan pemberdayaan kewirausahaan UMK. Dengan demikian, desain program kredit mikro harus mampu mendukung terciptanya ekosistem keuangan mikro yang kondusif bagi berkembangnya pelaku LKM yang sangat beragam, serta secara gradual meningkatkan kemampuan bisnis dan skala ekonomi UMK. Dalam konteks inilah kolaborasi yang baik dengan akademisi dan LSM sangat diperlukan dalam proses pemberdayaan UMK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa sehingga orasi profesor riset ini dapat berjalan lancar dan penuh hikmat.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto dan Presiden Republik Indonesia ke-7, bapak Ir. Joko Widodo atas amanat penugasan sebagai peneliti ahli utama di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.; Wakil Kepala BRIN, Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., ASEAN Eng. atas amanah dan dukungan selama ini. Serta, terima kasih atas dukungan dan fasilitasi kepada Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset BRIN, Prof. Ir. Wimpie Agoeng Noegroho Aspar, MSCE., Ph.D.; dan Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset BRIN, Prof. Dr. Ir. Zainal Arifin, M.Sc.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah BRIN yaitu Prof. Dr. Syarif Hidayat, Prof. Dr. Ir. Mat Syukur, M.S. dan Prof. Dr. Izza Mafruhah, S.E., M.Si. atas semua masukan dan saran sehingga naskah orasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Panitia Pelaksana Pengukuhan dan semua pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih saya ucapkan kepada Sekretaris Utama BRIN, Ibu Nur Tri Aries, S.IP., M.A., Kepala BOSDM BRIN, dan Kepala Pusat Riset di lingkup OR TKPEKM, dan seluruh civitas OR TKPEKM. Perjalanan karir ini tidak akan tercapai tanpa peran penting dari para

guru pendidik mulai dari sekolah dasar hingga universitas. Terima kasih kepada dosen dan pembimbing S1 di FE UNS yang telah memperkenalkan saya dengan ilmu ekonomi: Prof. Dr. Junastiti Purwaningsih dan Drs. Soemardi S.E. (alm.). Pembimbing S2 pada Department of Applied Economics, Massey University, New Zealand: Assoc. Prof. Dr. James Obben dan Assoc. Prof. Dr. Shamim Shakur, dan Prof. Dr. Phillip Anthony O'Hara, Pembimbing S3 pada School of Economics & Finance, Curtin University of Technology, Australia.

Saya mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan terdahulu, senior dan kolega saat di Pusat Penelitian Ekonomi, IPSK-LIPI: Prof. Dr. Aswatini, M.A., Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A., Prof. Dr. Carunia M. Firdausy, Drs. Mahmud Thoha, M.A., Drs. Darwin, M.Sc. Dr. Widjaya Adi (alm.), Dr. Thee Kian Wie (alm.) dan Drs. Ahmad Hamid (alm.). Terima kasih atas bimbingan dan dorongan untuk terus berkarya dan menjadi peneliti yang baik.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga, terutama istri saya, Sri Wiyantini, atas doa dan dukungannya selama ini.

Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara orasi pengukuhan profesor riset dan seluruh tamu undangan.

Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Pengabdian tanpa henti untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNYA kepada kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

DAFTAR PUSTAKA

Aleem, I. (1993). Imperfect information, screening, and the costs of informal lending: A study of a rural credit market in Pakistan. Dalam K. Hoff, A. Braverman, & J.E. Stiglitz (eds.). *The economics of rural organization: Theory, practice and policy*. Oxford University Press for the World Bank.

Armendariz, B. & Morduch, J. (2005). *The economics of microfinance.* The MIT Press.

Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2010). Financial institutions and market across countries and over time. *World Bank Economic Review*, 24(1): 77–92. DOI: https://doi.org/10.1093/wber/lhp016

Badan Pusat Statistik/BPS. (2019). *Statistik koperasi simpan pinjam tahun 2019*. BPS.

Badan Pusat Statistik/BPS. (2025). *Statistik Indonesia tahun 2025*. BPS.

Charitonenko, S., Campion, A., & Fernando, N.A. (2004). *Commercialization of microfinance: Perspectives from South and Southeast Asia*. ADB.

Charitonenko, S., & Afwan, I. (2004). *Commercialization of microfinance: Indonesia.* ADB.

Cheston, S., Conde, T., Bykere, A., & Rhyne, E. (2016). *The business of financial inclusion: Insight from banks in emerging market.* Institute of International Finance (IIF) and Center for Financial Inclusion - ACCION.

Christen, R.P., Rosenberg, R., & Jayadeva,V. (2004). Financial institutions with a double bottom line. *CGAP Occasional Paper*, 8(7).

Cozarenco, A. (2015). Microfinance institutions and banks in Europe: The story to date. *Working Papers CEB 15-027.* Universite Libre de Bruxelles.

Dermiguc-Kunt, A., & Klapper, L. (2012). *Measuring financial inclusion: The global findex database.* World Bank.

Dermiguc-Kunt, A. and Levine, R. (2008). Finance, financial sector policies, and long-run growth. *Working Paper No. 11*. Commission on Growth and Development, IBRD and World Bank.

Djoyohadikusumo, S. (1989). *Kredit rakyat di masa depresi*. LP3ES.

Ermawati, T., Adi, I.R., & **Nugroho, A.E.** (2024). The impact of microfinance on community welfare: A bibliometric analysis and systematic literature review (SLR). *Journal of Poverty,* 1–25. DOI: https://doi.org/10.1080/10875549.2024.2426817.

Ermawati, E., **Nugroho, A.E.,** Soekarni, Firdaus, N., Sarana, J., Edi, RY., Adityawati, S., & Suardi, I (2022). The COVID-19 pandemic and its impact on microfinance institutions in Indonesia. *Enterprise Development & Microfinance*, 32(1–2). DOI: https://doi.org/10.3362/1755-1986.21-00002.

Geleta, E.B. (2015). *The microfinance mirage: The politics of poverty, social capital and women's empowerment in Ethiopia.* Routledge.

Donzales-Vega, C. (1989). Rural financial services as a development factor. *Economics and Sociology Occasional Paper No. 1636*. Department of Agricultural Economics and Sociology, Ohio State University.

Hoff, C., & Stigliz, J. (1997). Moneylenders and bankers: Price-increasing subsidies in a monopolistically competitive market. *Journal of Development Economics,* 52(2). 428–462. DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-3878(96)00443-9.

Isern, J., & Porteous, D. (2005). Commercial banks and microfinance: Evolving models of success. *CGAP Focus Note*, 28(6).

Jespersen, J. (2009). Bridging the gap between monetary circuit theory and post-keynesian monetary theory. Dalam J.F. Ponsot, & S. Rossi (eds.) *The political economy of monetary circuit, tradition and change in post-keynesian economics.* Palgrave Macmillan.

Johnson, S. (2013). From microfinance to inclusive financial market, the challenge of social regulation. *Oxford Development Studies,* 41(Supplement): S35-52. DOI: 10.1080/13600818.2012.734799

Johnson, S., & Williams, R. (2013). The political economy of financial inclusion: Tailoring donor policy to fit. *Development Policy Review, Overseas Development Institute*, 34(5), 721–743.

Kelly, & Rhyne, E. (2015). *By the number: Benchmarking progress toward financial inclusion*. Center for Financial Inclusion-ACCION.

Karlan, D. (2007). Social Connections and Group Banking. *The Economic Journal,* 117(517), 52–84. Oxford University. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2007.02015.x

King, R.G., & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. *Quarterly Journal of Economics*, 108, 717–738. https://doi.org/10.2307/2118406.

Ledgerwood, J., Earne, J., & Nelson, C. (eds.). (2013). *The New microfinance handbook: A financial market system perspectives.* The World Bank.

Levine, R. (1997). Financial Development and Growth: Views and Agenda. *Journal of Economic Literature*, 35(6), 688–726.

Meyer, R., & Nagarajan, G. (2006). Microfinance in developing countries: Accomplishments, debate and future direction. *Agricultural Finance Review,* 66(2), 167-193.

Morduch, J. (2006). Smart subsidy. *Economic Self-Reliance (ESR) Review,* 8(1), 10–17.

Nugroho, A.E. (2020a, 26 Agustus 2020). *Dampak Covid-19 terhadap rumah tangga dan UMKM* [Presentasi paper]. Thee Kian Wie Lecture Series 5th, P2E-LIPI, Jakarta, Indonesia.

Nugroho, A.E. (2020b). Kontradiksi Daya Saing dan Inklusivitas Keuangan: Perspektif Ekonomi Politik. Dalam C.M. Firdausy, & E. Lestari (eds.). *Fundamen konsep pembangunan inklusif berdaya saing.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nugroho, A.E. (2020c). Dimensi ECOPOS Kredit Usaha Rakyat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Dalam C.M. Firdausy (ed.). *Garis kemiskinan dan kemiskinan ECOPOS.* LIPI Press.

Nugroho, A.E. (2019, 30 April 2019). *Kendala dan tantangan inklusivitas keuangan di Indonesia* [Presentasi paper]. Thee Kian Wie Lecture Series 4th, P2E-LIPI, Jakarta, Indonesia.

Nugroho, A.E. (2017a). Program kredit mikro sebagai intervensi pasar untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dalam Y. Saptia, & **A.E. Nugroho** (eds.). *Penguatan peran program kredit mikro dalam mendorong pengembangan UMKM di sektor pertanian.* LIPI Press.

Nugroho, A.E. (2017b). Politik Ekonomi Kredit Program untuk Pemberdayaan Usaha Mikro-Kecil. Dalam Y. Saptia, & **A.E. Nugroho** (eds.) *Penguatan peran program kredit mikro dalam mendorong pengembangan UMKM di sektor pertanian.* LIPI Press.

Nugroho, A.E. (ed.). (2016a). *Komersialisme kredit usaha rakyat untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia.* LIPI Press.

Nugroho, A.E. (2016b). Komersialisasi kredit program untuk pengembangan UMKM dan penanggulangan kemiskinan: Kasus kredit usaha rakyat. Dalam A.E. Nugroho (ed.). *Komersialisme kredit usaha rakyat untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia.* LIPI Press.

Nugroho, A.E. (2016c). Maping permasalahan desain kebijakan dan implemetasi program kredit usaha rakyat. Dalam A.E. Nugroho (ed.). *Komersialisme kredit usaha rakyat untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia.* LIPI Press.

Nugroho, A.E. (ed.). (2014). Kredit usaha rakyat di era otonomi daerah: membangun sinergi antara kelembagaan pasar, pemerintah daerah dan komunitas dalam mengelolaan kredit program untuk pemberdayaan UMKM. *Seri Laporan Penelitian Tahun 2014*. P2E-LIPI.

Nugroho, A.E. (ed.). (2013). *Program PNPM mandiri perdesaan dan reproduksi modal sosial.* LIPI Press.

Nugroho, A.E. (ed.). (2012). Kredit usaha rakyat di era otonomi daerah: Membangun sinergi antara kelembagaan pasar, pemerintah daerah dan komunitas dalam pengelolaan kredit program untuk pemberdayaan UMKM. *Seri Laporan Penelitian Tahun 2012*. P2E-LIPI.

Nugroho, A.E. (2011). *Microfinance development in Indonesia: Market segmentation, social capital and welfare outreach to the poor in rural Java.* Lambert Academic Publishing.

Nugroho, A.E. (2010). Pemberdayaan masyarakat miskin melalui PNPM mandiri perdesaan. Dalam D.S. Husodo (ed.). *Analsis dampak conditional cash transfer untuk pengentasan kemiskinan.* LIPI Press.

Nugroho, A.E. (2009). *Market segmentation, social capital and welfare–outreach in microfinance: A case study of Indonesia* [Tesis tidak diterbitkan]. Curtin University of Technology, School of Economics and Finance.

Nugroho, A.E. (2008a). The role of social capital in microfinance, evidence from rural Java. Dalam D.M. Nault (ed.). *Development in Asia.* BrownWalker Press.

Nugroho, A.E. (2008b). Critical review of the link between social capital and microfinance in Indonesia. *Journal of Business and Economy, FEB UGM*, 23(2). DOI: https://doi.org/10.22146/jieb.6344

Nugroho, A.E. (2006). Microfinance commercialization, challenge and issues in developing countries: A critical literature review. *Economics and Finance in Indonesia, FE-UI*. 54(2).

Nugroho, A.E., Saptia, Y. dan Indah, C. (2016) "Kinerja Bank Pembangunan Daerah dalam Penyaluran KUR" dalam AE. Nugroho (ed.). *Komersialisme kredit usaha rakyat untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia.* LIPI Press.

Otoritas Jasa Keuangan/OJK. (2017). *Survey nasional literasi dan inklusi keuangan 2016.* OJK.

Otoritas Jasa Keuangan/OJK. (2019). *Statistik keuangan Indonesia tahun 2019.* OJK.

Otoritas Jasa Keuangan/OJK. (2025). *Statistik keuangan Indonesia tahun 2025.* OJK.

O'Hara, P.A. (2009). The principle of circular and cumulative causation, myrdal, kaldor and contemporary heterodox political economy. Dalam S. Berger (ed.). *The foundation of non-equilibrium economics.* Routledge.

O'Hara, P.A. (2022) *Principles of Institutional and Evolutionary Political Economy Applied to Current World Problem.* Singapore: Springer.

Pawestri, R., & **Nugroho, A.E.** (2016). Peran dan Kendala Bank Pelaksana dalam Mendukung Program Kredit Usaha Rakyat. Dalam A.E. Nugroho (ed.). *Komersialisme kredit usaha rakyat untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia.* LIPI Press.

Polillo, S. (2011). Wildcat in banking fields: Politics of financial inclusion. *TheorSoc*, 40, 347–383. DOI 10.1007/s11186-011-9146-4.

Postelnicu, L., Hermes, N., & Szafarz, A. (2014). Defining social capital in microfinance group lending. Dalam R. Mersland and R.O. Strom (eds.). *Financial and social performance of microfinance institutions.* Palgrave Macmillan.

Pranata, N., Soekarni, M., Mychelisda, E., Novandra, R., **Nugroho, A.E.,** Rifai, B., Buhaerah, P., Zulhamdani, M., & Yuliana, R.R.D. (2022). Technology adoption issues and challenges for micro, small and medium enterprises: A case study of the food and beverage sub-sector in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business,* 9(3), 265–274. https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no3.0265.

Pranata, P., Farandy, A.R., & **Nugroho, A.E.** (2021). Transformasi layanan keuangan bebasis digital di Indonesia: Karakteristik, perkembangan, hambatan dan tantangan di Indonesia. Dalam I. Maulana, D. Prihadyanti, & A.Y. Asmara (eds.). *Praktik inovasi di Indonesia: Isu, kebijakan, dan tantangan.* LIPI Press.

Rhyne, E. (2014). *The political economy of financial inclusion.* Center for Financial Inclusion.

Robinson. J. (1952). *The generalization of the general theory. In the rate of interest and other essays.* 2nd Edition. Macmillan.

Robinson, M.S. (2001). *Microfinance revolution: Lesson from Indonesia.* Volume 2. The World Bank.

Schumpeter, J.A. (1912). *The theory of economic development: An inquiry into profit, capital, credit, interest rates and business cycles.* Oxford University Press.

Saptia, Y., & **Nugroho, A.E.** (eds.). (2016). Penguatan peran microfinance dalam pemberdayaan UMKM. *Seri Laporan Penelitian Tahun 2016*. P2E-LIPI.

Saptia, Y., & **Nugroho, A.E.** (eds.). (2017). *Penguatan peran program kredit mikro dalam mendorong pengembangan UMKM di sektor pertanian.* LIPI Press.

Saptia, Y., **Nugroho, A.E.,** Soekarni, M., Ermawati, T., Syamsulbahri, D., Astuty, E.D., Suardi, I., & Yuliana, R.D. (2021). Determinants of accessibility to fintech lending: A case study of micro and small enterprises (MSEs) in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business,* 8, 129–138. Doi: 10.13106/jafeb.2021.vol8.no10.0129.

Stiglitz, W., & Weis, A. (1981). Credit rationing in market with imperfect information. *American Economic Review*, 71(3), 393–410.

Tobit, H., & Mardini, M. (2015). *The relationship between commercial bank and microfinance institutions* [Presentasi paper]. The 14th Scientific Conference, Al-Mansour University College, Iraq.

Yokoi-Arai, M., & Yoshino, N. (2006). Concept of competitiveness in the financial sector. *Financial Research Training Center-Discussion Paper Series No. 24*. FSA Institute, Japan.

DAFTAR CAPAIAN DALAM BIDANG IPTEK, RISET, DAN INOVASI

1.	Buku Internasional	0 buah
2.	Buku Nasional	5 buah
3.	Bagian dari Buku Internasional	4 buah
4.	Bagian dari buku Nasional	32 buah
5.	Jurnal Internasional	18 buah
6.	Jurnal Nasional	13 buah
7.	Prosiding Internasional	6 buah
8.	Prosiding Nasional	4 buah

DAFTAR CAPAIAN DALAM BIDANG IPTEK, RISET, DAN INOVASI

Karya Tulis Ilmiah

Buku Nasional

1. Saptia, Y., **Nugroho, A.E.**, & Soekarni, M. (eds.). (2020). *Perluasan akses keuangan UMKM berbasis tekfin di Indonesia dan pengalaman negara tetangga.* Pustaka Obor Indonesia.
2. Saptia, Y., & **Nugroho, A.E.** (eds.). (2017). *Penguatan peran program kredit mikro dalam mendorong pengembangan UMKM di sektor pertanian.* LIPI Press.
3. **Nugroho, A.E.** (ed.). (2016). *Komersialisme kredit usaha rakyat untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia.* LIPI Press.
4. Ismail Z., **Nugroho, A.E.,** Soekarni, M., & Saptia, Y. (2014). *Peranan lembaga keuangan mikro non-bank dalam pembiayaan usaha mikro.* LIPI Press.
5. **Nugroho, A.E.,** Adam, L., Tjitroresmi, E., & Aryo, B. (2010). *Program anti kemiskinan dan reproduksi modal sosial*. LIPI Press.

Bagian dari Buku Nasional

6. Handoyo, F.W., Dalimunthe, S.A., Purwanto, Suardi, I., Yuliana, C.I., Mychelisda, E., Wardhana, I.W., & **Nugroho, A.E.** (2023). Urgensi pembiayaan risiko kebencanaan: Pembelajaran dari gempa Cianjur. Dalam M. Irsyam, S. Widiyantoro, D.H. Natawidjaja, ..., L. Faizal (eds.). *Kajian Gempa Cianjur Provinsi Jawa Barat.* Kementerian PUPR Indonesia.

7. Mulyaningsih, Y., Nurjati, E., & **Nugroho, A.E.** (2021). Konstruksi ekosistem bagi pengembangan kewirausahaan UMKM. Dalam Y. Mulyaningsih, & Darwin (eds.). *Pengembangan ekosistem kewirausahaan UMKM di Indonesia.* Penerbit BRIN.

8. Pranata, P., Farandy, AR., & **Nugroho, A.E.** (2021). Transformasi layanan keuangan bebasis digital di Indonesia: Karakteristik, perkembangan, hambatan dan tantangan di Indonesia. Dalam I. Maulana, D. Prihadyanti, & A.Y. Asmara (eds.). *Praktik inovasi di Indonesia: Isu, kebijakan, dan tantangan.* LIPI Press.

9. Nuryanti, S., & **Nugroho, A.E.** (2021). Ekonomi Indonesia menjelang pemilu serentak 2019. Dalam L.S. Amalia (ed.). *Dinamika sosial-politik pemilu serentak 2019.* LIPI Press.

10. **Nugroho, A.E.** (2020). Kontradiksi Daya Saing dan Inklusivitas Keuangan: Perspektif Ekonomi Politik. Dalam E. Lestari, & C.M. Firdausy (eds). *Fundamen konsep pembangunan inklusif berdaya saing.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

11. **Nugroho, A.E.** (2020). Dimensi ECOPOS Kredit Usaha Rakyat Dalam Penagggulangan Kemiskinan. Dalam C.M. Firdausy (ed.). *Garis kemiskinan dan kemiskinan ECOPOS.* LIPI Press.

12. Yuliana, R.D., & **Nugroho, A.E.** (2020). Analisis perkembangan tekfin di Tiongkok dan India sebagai pelajaran bagi Indonesia. Dalam Y. Saptia, **A.E. Nugroho**, & M. Soekarni (eds.). *Perluasan akses keuangan UMKM berbasis tekfin di Indonesia dan pengalaman negara tetangga.* Pustaka Obor Indonesia.

13. **Nugroho, A.E.** (2017). Program kredit mikro sebagai intervensi pasar untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dalam Y. Saptia, & **A.E. Nugroho** (eds.). *Penguatan peran program kredit mikro dalam mendorong pengembangan UMKM di sektor pertanian.* LIPI Press.

14. **Nugroho, A.E.** (2017). Politik Ekonomi Kredit Program untuk Pemberdayaan Usaha Mikro-Kecil. Dalam Y. Saptia, & **A.E. Nugroho** (eds.). *Penguatan peran program kredit mikro dalam mendorong pengembangan UMKM di sektor pertanian.* LIPI Press.

15. **Nugroho, A.E.** (2016). Komersialisasi kredit program untuk pengembangan UMKM dan penanggulangan kemiskinan: Kasus kredit usaha rakyat. Dalam **A.E. Nugroho** (ed.). *Komersialisme kredit usaha rakyat untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia.* LIPI Press.

16. **Nugroho, A.E.** (2016). Maping permasalahan desain kebijakan dan implemetasi program kredit usaha rakyat. Dalam **A.E. Nugroho** (ed.). *Komersialisme kredit usaha rakyat untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia.* LIPI Press.

17. **Nugroho, A.E.** (2015). Penguatan kelembagaan pariwisata dalam menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam A.S. Hidayat (ed.). *Persiapan sektor pariwisata Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN*. LIPI Press.

18. **Nugroho, A.E.** (2014). Kredit usaha rakyat di era otonomi daerah: Membangun sinergi antara kelembagaan pasar, pemerintah daerah dan komunitas dalam mengelolaan kredit program untuk pemberdayaan UMKM. *Seri Laporan Penelitian Tahun 2014*. P2E-LIPI.

19. **Nugroho, A.E.** (2010). Pemberdayaan masyarakat miskin melalui PNPM mandiri perdesaan. Dalam D.S. Husodo (ed). *Analisis dampak conditional cash transfer untuk pengentasan kemiskinan.* LIPI Press.

20. **Nugroho, A.E.,** Saptia, Y., & Indah, C. (2016). Kinerja bank pembangunan daerah dalam penyaluran KUR. Dalam **A.E. Nugroho** (ed.). *Komersialisme kredit usaha rakyat untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia.* LIPI Press.

21. Pawestri, R., & **Nugroho, A.E.** (2016). Peran dan kendala bank pelaksana. Dalam **A.E. Nugroho** (ed.). *Mendukung program kredit usaha rakyat dalam komersialisme kredit usaha rakyat untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia.* LIPI Press.

22. Saptia, Y., & **Nugroho, A.E.** (2016). Penguatan peran mikrofinance dalam pemberdayaan UMKM. *Seri laporan penelitian tahun 2016*. P2E-LIPI.

23. **Nugroho, A.E.** (2015). Dinamika lembaga keuangan mikro syariah dan pentingnya pengembangan linkage antarlembaga keuangan syariah. Dalam M. Soekarni (ed.). *Perkembangan bank pembiayaan syariah di Indonesia: Kendala, peluang dan tantangan ke depan.* LIPI.

24. **Nugroho, A.E.** (2015). Keterkaitan Bisnis BPRS dan BMT. Dalam M. Soekarni (ed.). *Perkembangan bank pembiayaan syariah di Indonesia: Kendala, peluang dan tantangan ke depan.* LIPI.

25. **Nugroho, A.E.,** Noer, M., & Jalal, A. (2011). *Pergeseran perencanaan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah: Studi kasus Sumatera Barat.* Sekjen DPD RI.

26. **Nugroho, A.E.** (2010). Program anti kemiskinan dan kegiatan ekonomi rumah tangga miskin. Dalam **A.E. Nugroho** (ed.). *Program antikemiskinan dan reproduksi modal sosial: Studi kasus PNPM mandiri perdesaan*. LIPI.

27. **Nugroho, A.E.** (2010). Analisis permasalahan kemiskinan. Dalam **A.E. Nugroho** (ed.). *Program antikemiskinan dan reproduksi modal sosial: Studi kasus PNPM mandiri perdesaan.* LIPI.

28. **Nugroho, A.E.** (2010). Kendala dan tantangan program PMPN mandiri pedesaan. Dalam **A.E. Nugroho** (ed.). *Program antikemiskinan dan reproduksi modal sosial: Studi kasus PNPM mandiri perdesaan.* LIPI.

29. **Nugroho, A.E.** (2009). Analisis program anti kemiskinan BLT dan PNPM mandiri perdesaan. Dalam D.S. Husodo (ed.). *Kebijakan anti-kemiskinan: Analisis komparatif terhadap conditional dan unconditional cash transfer.* Kementerian DIKNAS dan LIPI.

30. **Nugroho, A.E.** (2009). Keterkaitan antara ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dalam Purwanto (ed.). *Pengurangan kemiskinan melalui penguatan ketahanan pangan.* LIPI.

31. **Nugroho, A.E.** (2003). Dampak pengurangan subsidi BBM terhadap pola konsumsi masyarakat. Dalam Zamroni (ed.). *Dampak pengurangan subsidi BBM terhadap kondisi ekonomi masyarakat.* LIPI.

32. **Nugroho, A.E.** (2003). Karakteristik investasi Eropa di Thailand. Dalam E. Erman (ed.). *Karakteristik investasi Uni Eropa di ASEAN: Studi kasus Malaysia dan Thailand.* LIPI.

33. **Nugroho, A.E.** (2003). Stabilitas sektor perbankan dan keuangan sebagai upaya memperkuat ekonomi domestik. Dalam W. Adi (ed.). *Strategi penguatan ekonomi domestik.* LIPI.

34. **Nugroho, A.E.** (2002). Sektor keuangan dan krisis moneter dampak krisis ekonomi Asia di Malaysia dan Thailand. Dalam E. Erman (ed.). *The impact of Asian economic crisis in Malaysia and Thailand.* PSDR-LIPI.

35. **Nugroho, A.E.** (2001). Reformasi Bank Indonesia dan arah kebijakan moneter. Dalam **A.E. Nugroho** (ed.). *Industri perbankan dan keuangan nasional*. LIPI.

36. **Nugroho, A.E.** (2001). Independensi Bank Indonesia dan kebijakan moneter. Dalam L. Adam (ed.). *Program stabilisasi IMF dan implikasinya terhadap kinerja perekonomian Indonesia*. LIPI.

37. **Nugroho, A.E.** (2001). *Industri perbankan dan keuangan nasional*. P2E-LIPI.

Bagian dari Buku Internasional

38. Muawanah, U., Salim, Z. and **Nugroho, A.E.** (2025). Toward Sustainable Ocean Governance: Research for Inclusive and Equitable Development in Indonesia". Dalam ? (ed.). *A Research Agenda for Sustainable Ocean Governance.* Edward Elgar.

39. Jamal, E., Sahara, S., Izzulhaq, S., Amaliah, S., Ahmad, F.S., Komalawati, K., Buhaerah, P., Martino, I., Metafurry, W., Mutaqin, D.J., Firdaus, I.T., Setyawati, D., Pradesha, A., Yulaswati, V., Beik, I.S., Wardhana, I.W., Indarto, J., **Nugroho, A.E.**, Arifin, B., Sudaryanto, T. (2025). What do we know about the future of the agrifood system in Indonesia?. Dalam ? (ed.). *What do we know about the future of food systems?.* IFPRI.

40. **Nugroho, A.E.** (2008). The role of social capital in microfinance: Evidence from rural Java". Dalam D.M. Nault (ed.). *Development in Asia.* BrownWalker Press.

41. Suardi, I., Handoyo, F.W., Yuliana, C.I., Dalimunthe, S.A., Mychelisda, E., Purwanto, P., Wardhana, I.W., & **Nugroho, A.E.** (2024). Is flood insurance scheme in regional areas feasible? An explorative study in Riau, Indonesia. Dalam ? (ed.). *Springer Nature sustainable development goals series - examining disaster risk reduction in Indonesia: Building social resilience.* Springer Nature.

Jurnal Internasional

42. **Nugroho, A.E.,** Muawanah, U., Pomeroy, R.S., & Pramadhana, D. (2026). Analyzing coral reef degradation in Indonesia using O'Hara's principles of political economy. *Marine Policy,* 193.

43. Lestari, E., Adam, L., **Nugroho, A.E.,** Soekarni, M., Ermawati, T., Saptia, Y., handoyo, F. Suadi, I., & Sarana, J. (2026). The signaling trap: How crisis lending reinforced informal MSME exclusion in Indonesia's financial system. *Journal of Risk and Financial Management*, 2026 19, 494.

44. Ermawati, T., **Nugroho, A.E.,** Adi, I.R., Soekarni, M., Suyatno, B., Sarana, J., Yuliana, C.I., Saptia, Y., Mychelisda, E., Salim, Z., Edi, R.Y., & Adityawati, S. (2026). Strengthening the microfinance ecosystem in Indonesia: Competition-collaboration nexus and supporting system. *Sage Open*, 1–19.

45. Adam, L., Saptia, Y., Soekarni, M., Sarana, J., Suryanto, J., Ermawati, T., Adityawati, S., & **Nugroho, A.E.** (2026). Drivers of competitiveness in Indonesia's zakat institutions: An empirical study using Porter's diamond framework. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1–30.

46. Mahatma, I.G., **Nugroho, A.E.**, Astrini, N., Husodo, D.S., Hariyadi, H., Yuliana, I.C., Andriasyah, R.H., Savitrym, R., Purba, S.F., & Samsara, L. (2025). Energy saving behaviour in workplace: A bibliometric and visualization analysis. *Journal of Energy Production and Management*, 10(2).

47. Ermawati, T., Adi, I.R., & **Nugroho, A.E.** (2024). The impact of microfinance on community welfare: A bibliometric analysis and systematic literature review (SLR). *Journal of Poverty*, 1–25.

48. Handoyo, F.W., Dalimunthe, S.A., Purwanto, P., Suardi, I., Yuliana, C.I., Mychelisda, E., Wardhana, I.W., & **Nugroho, A.E.** (2024). Enhancing disaster resilience: Insights from the Cianjur earthquake to improve Indonesia's risk financing strategies. *Sage Open,* 14(2), 1–16.

49. Anbumozhi, V., Babu, S., Bollino, C.A., Diyanah, S.M., Kozono, M., Hanifah, V.W., Hidayat, S., **Nugroho, A.E.,** Wardhana, I.W., Kumar, A., Permani, R., Sahara, S., Syukur, M. (2022). Digital transformation of agri-food system: Policy pathways for greater socio-economic inclusion, sustainability, and international cooperation. *G20 Digest Vol. 2, No. 1, Research and Information System for Developing Countries (RIS).*

50. Ramadhan, A., Oktavia, P., Huda, H.M., Pramoda, R., Apriliani, T., Suardi, I., Putri. H.M., Koeshendrayana, S., Yaumidin, U.Y., & **Nugroho, A.E.** (2025). Integrating local knowledge for inclusive blue economy: Opportunity and challenge of institutional briocolage. *Australian Journal of Marine & Ocean Affairs,* 17(3).

51. Saptia, Y., **Nugroho, A.E.,** Soekarni, M., Ermawati, T., Syamsulbahri, D., Astuty, E.D., Suardi, I., Yuliana, R.D. (2021) Determinants of accessibility to fintech lending: A case study of micro and small enterprises (MSEs) in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business,* vol. 8, 129–138.

52. Ermawati, E., **Nugroho, A.E.,** Soekarni, Firdaus, N., Sarana, J., Edi, R.Y., Adityawati, S., & Suardi, I. (2022). The COVID-19 pandemic and its impact on microfinance institutions in Indonesia. *Enterprise Development & Microfinance, Vol. 32, Issue 1–2.*

53. **Nugroho, A.E.** (2011). The welfare impacts of microfinance on rural households: Evidence from Boyolali of Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia.*

54. **Nugroho, A.E.** (2006). Microfinance commercialization, challenge and issues in developing countries: A critical literature review. *Economics and Finance in Indonesia*, 54(2).

55. **Nugroho, A.E.** (2008). Critical review of the link between social capital and microfinance in Indonesia. *Journal of Business and Economy*, 23(2).

56. Pranata, N., Soekarni, M., Mychelisda, E., Novandra, R., **Nugroho, A.E.,** Rifai, B., Buhaerah, P., Zulhamdani, M., & Yuliana, R.R.D. (2022). Technology adoption issues and challenges for micro, small and medium enterprises: A case study of the food and beverage sub-sector in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business,* 9(3), 265–274.

57. Obben, J., & **Nugroho, A.E.** (2003). A balancing approach on banking volatility In Indonesia. *Journal of Developing Area.* University of Tanasee USA.

58. Shakur, S., Obben, J., & **Nugroho, A.E.** (2004)**.** Financial sector reforms and currency crisis: The Indonesian experience. *International Review of Applied Economics*, 1(2).

59. **Nugroho, A.E.** (2000)**.** A simple economic model of the Indonesia exchange rate fluctuation. *International Journal of Business,* FEB UGM, Vol 3. No.1.

Jurnal Nasional

60. **Nugroho, A.E.** & Andadari R.K. (2018). Job creation and skills improvement: A review of government programs In Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan.*

61. **Nugroho, A.E.** (2012). Neoliberalisme global dan implikasinya pada dominasi asing dan masalah kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Tarumanegara,* 17(2).

62. **Nugroho, A.E.** (2011). Pro-poor policy of microfinance in Indonesia. *Journal of Economics & Business (JEBI).* Gadjah Mada University.

63. **Nugroho, A.E.**, & Hidayat, S.H. (2010). Good governance dalam pengelolaan investasi di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan,* 17(2).

64. **Nugroho, A.E.** (2009). The commercialization-outreach nexus of microfinance in Indonesia: The case study of microfinance industry in Boyolali, Central Java. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan,* 17(2), 55–64.

65. **Nugroho, A.E.** (2008). Heterogeneous characteristics of microfinance clients and institutions: Theoretical implications and policy issues in Indonesia". *Ekonomi Keuangan,* 56(2).

66. **Nugroho, A.E.** (2004). The East Asian monetary cooperation: A survey of recent progresses. *The Indonesian Quarterly,* vol.32 no.2. CSIS Jakarta.

67. **Nugroho, A.E.** (2004). A balance sheet approach on determinants of the funding volatility of bank in Indonesia. *Ekonomi dan Keuangan,* vol. 52 no. 1.

68. **Nugroho, A.E.** (2004). Upaya memperkuat stabilitas moneter dan perbankan. *Analisis CSIS,* 33(3).

69. **Nugroho, A.E.** (2003). Restrukturisasi sektor keuangan di Thailand pasca krisis moneter 1997/1998. *Jurnal Kajian*, 6(9).

70. **Nugroho, A.E.** (2003). Volatilitas dana perbankan dan implikasinya terhadap krisis perbankan di Indonesia. *Masyarakat Indonesia,* Vol. XXIX, No.2.

71. **Nugroho, A.E.** (2001). Trade policies and the export performance of Indonesia 1983–1997. *Journal The Winner,* Vol 1. No.2. Binus University.

72. **Nugroho, A.E.** (2000). The linkage between banking sector and the Indonesia currency crisis. *Jurnal Ekonomi & Pembangunan*.

Prosiding dan *Working Paper*

73. Andriansyah, R.H., Yuda B.I.G.M., **Nugroho, A.E.**, Hariyadi, H., Astrini, N., Yuliana, C.I., Purba, S.F., Husodo, D.S., & Samsara, L. (2024). The urgency of energy saving practices in bureaucratic reform implementation of government-owned institutions in Indonesia. Dalam *IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciences 1488 (2025) 012128.*

74. Farandy, A. Prasetyoputro, P., Muawanah, U. and **Nugroho, A.E.** (2924) "Hunger Amidst Plenty: Food Insecurity among Fishing Household in Indonesia". *in Conference the 21st IIFET. Penang Malaysia Jully 2024.*

75. Handoyo, FW., Delimunthe, SA., Purwanto., P., Suardi, I., Yuliana., CI., Mychelisda, E., Wardhana, IW., and **Nugroho, A.E.** (2023). A Call for Inclusive Disaster Risk Financing in Indonesia:

Addressing Vulnerability in High-risk Areas. *In E3S Web of Conferences 447,06003 (2023) the 15st AIWEST-DR 2023.*

76. Suardi, I. dan **Nugroho, A.E.** (2024) *Strengthening MSME's Resilience and Adaptability to Accelerate Economic Recovery Post-Covid-19 Pandemic in Indonesia. BESS 2013. The 3rd International Conference on Business, Economics and Sustainable Sciences Volume 2024. KnE Social Sciences.*

77. **Nugroho, A.E.** (2020a). Dampak Covid-19 Terhadap Rumah Tangga dan UMKM. Dipresentasikan dalam *Thee Kian Wie Lecture Series 5th*. 26 Agustus 2020. P2E-LIPI. Jakarta.

78. Soekarni, M., **Nugroho, A.E.**, Rifai, B., & Mychelisda, E. Strategi Pengembangan Daya Saing Ekonomi Digital: Penguatan Inovasi Industri Manufaktur Berbasis Teknologi Digital. Jakarta: BRIN Working Paper.

79. **Nugroho, A.E.** (2019). Kendala dan Tantangan Inklusivitas Keuangan di Indonesia, Paper dipresentasikan dalam *Thee Kian Wie Lecture Series 4th*. 30 April 2019. P2E-LIPI.

80. **Nugroho, A.E.** (2009). *Market Segmentation, Social Capital and Welfare–Outreach in Microfinance: A Case Study of Indonesia,* Unpublished PhD Thesis. Perth, Western Australia: Curtin University, School of Economics and Finance.

81. Obben, J and **Nugroho, A.E.** (2003). Determinant of funding volatility of Indonesian banks: A dynanic model. *Discussion Paper No. 03.07 - 2003*. Massey University New Zealand.

82. **Nugroho, A.E.,** Obben, J., Shakur, S. (2000). Aspects of the linkage between the banking and currency crises of Indonesia. *Discussion Paper No. 15, Department of Applied Economics*. Massey University New Zealand.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama	:	Dr. Agus Eko Nugroho, S.E., M.Appl. Econ.
NIP	:	196810121994031006
Tempat,Tanggal Lahir	:	Bojonegoro,12 Oktober 1968
Agama	:	Islam
Anak ke		1 dari 3 Bersaudara
Jenis Kelamin	:	Pria
Nama Ayah Kandung	:	Ismoen (alm)
Nama Ibu Kandung	:	Hj. Siti Muniah
Nama Istri	:	Sri Wiyantini
Jumlah Anak	:	3
Nama Anak	:	Fairuz Gianirfan Nugroho
		Fayza Qairina Uzma
		Fahrezi Azka Ghifari
Nama Organisasi Riset	:	Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahaan, Ekonomi dan Kesejahteran Masyarakat
Nama Instansi		Badan Riset dan Inovasi Nasional
Judul Orasi	:	Memperkuat Inklusivitas Program Kredit dalam Kompleksitas dan Segmentasi Persaingan di Pasar Keuangan Mikro
Ilmu	:	Ilmu Ekonomi
Bidang		Bidang Moneter dan Pasar Keuangan
Kepakaran		Keuangan Mikro

No. SK Pangkat Terakhir	:	Kep Pres Nomor 17/K TAHUN 2024, tanggal 5 Agustus 2024
No. SK Peneliti Ahli Utama	:	Kep Pres Nomor 3/M TAHUN 2022, tanggal 19 Januari 2022
Tautan Scopus	:	https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=59123112400
Tautan Google Scholar	:	https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=zSplu8oAAAAJ

B. PENDIDIKAN FORMAL

No.	Jenjang	Nama Sekolah/ PT/ Universitas	Tempat/Kota/ Negara	Tahun Lulus
1.	Sekolah Dasar	SDN Dengok 2 Padangan	Padangan, Bojonegoro	1981
2.	SLTP	SMPN 1 Padangan	Padangan, Bojonegoro	1984
3.	SLTA	SMAN 1 Cepu	Cepu, Blora	1987
4.	S1	Universitas Sebelas Maret (UNS)	Surakarta, Indonesia	1993
5.	S2	Massey University	Palmerston North, New Zealand	2000
6.	S3	Curtin University of Technology	Perth, Western Australia	2010

C. PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Nama Pelatihan	Tempat/ Kota/ Negara	Tahun
1.	Diklat Prajabatan	Jakarta, Indonesia	1995

No.	Nama Pelatihan	Tempat/ Kota/ Negara	Tahun
2.	Diklat Leadership Development Program 2013 - LIPI	Jakarta, Indonesia	2013
3.	Diklat PIM TK. II	Jakarta, Indonesia	2019

D. JABATAN STRUKTURAL

No.	Jabatan/Pekerjaan	Nama instansi	Tahun
1.	Kepala Subbidang Kerja Sama, Pusat Penelitian Ekonomi	LIPI	2001–2005
2.	Kepala Bidang Keuangan dan Perbankan, Pusat Penelitian Ekonomi	LIPI	2013–2014
3.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian, Pusat Penelitian Ekonomi	LIPI	2014–2015
4.	Kepala Pusat Penelitian Ekonomi	LIPI	2015–2019
5.	Kepala Pusat Riset Ekonomi	BRIN	2019–2021
6.	Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	BRIN	sekarang

E. JABATAN FUNGSIONAL

No.	Jenjang Jabatan	Unit Kerja	TMT Jabatan
1.	Asisten Peneliti Muda	LIPI	01-05-2000
2.	Adjun Peneliti Muda	LIPI	01-08-2002

No.	Jenjang Jabatan	Unit Kerja	TMT Jabatan
3.	Peneliti Ahli Muda	LIPI	01-03-2010
4.	Peneliti Ahli Madya	LIPI	01-04-2012
5.	Peneliti Ahli Utama	LIPI	01-6-2017
6.	Peneliti Ahli Utama	BRIN	01-10-2021

F. KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN ILMIAH

No.	Nama Kegiatan	Kota/ Negara	Peran/ Tugas	Tahun
1.	Seminar Kajian Teori Ekonomi dalam Islam	Jakarta, Indonesia	Pemakalah	2004
2.	Evaluasi 100 Hari Perekonoman SBY	Jakarta, Indonesia	Pemakalah	2005
3.	Seminar 1 Tahun Kinerja Ekonomi SBY	Jakarta, Indonesia	Pemakalah	2005
4.	Seminar Outlook Ekonomi Indonesia 2006	Jakarta, Indonesia	Pemakalah	2005
5.	3rd Conference on Global Studies	Kobe, Jepang	Pemakalah	2008
6.	Seminar Nasional Peningkatan Kualitas KUR	Jakarta/ Indonesia	Pemakalah	2013
7.	Seminar Perluasan KUR Pada BPD	Jakarta/ Indonesia	Pemakalah	2014
8.	International Conference on 21st Century Maritim Silk Road	Fujian RRT	Pemakalah	2015

No.	Nama Kegiatan	Kota/ Negara	Peran/ Tugas	Tahun
9.	Hunger Amidst Plenty: Food Insecurity among Fishing Household in Indonesia". *in Conference the 21st IIFET.*	Penang, Malaysia	Pemakalah	2024
10.	Ide-Jetro: Challenge of Economic Cooperation in national projects of the Global South: the Case of Indonesia's New Capitol Construction	Tokyo, Jepang	Pemakalah	2024
11.	Thee Kian Wie Lecture Series 5th	Jakarta, Indonesia	Pemakalah	2025
12.	BRICS conference on Innovation Ecosystem & Start-up Development	Jakarta, Daring	Pemakalah	2026

G. CAPAIAN DALAM BIDANG IPTEK, RISET, DAN INOVASI

1. Karya Tulis Ilmiah

a) Kualifikasi Karya

No.	Kualifikasi Karya	Jumlah
1.	Buku Internasional	0
2.	Buku Nasional	5
3.	Bagian dari Buku Internasional	4

No.	Kualifikasi Karya	Jumlah
4.	Bagian dari Buku Nasional	32
5.	Jurnal Internasional	18
6.	Jurnal Nasional	13
7.	Prosiding Internasional	6
8.	Prosiding Nasional	4

b) Kualifikasi Penulis

No.	Kualifikasi Penulis	Jumlah
1.	Penulis Tunggal	44
2.	Bersama Penulis Lainnya	38
	Total	82

c) Kualifikasi Bahasa

No.	Kualifikasi Bahasa	Jumlah
1.	Bahasa Indonesia	45
2.	Bahasa Inggris	37
3.	Bahasa Lainnya	0
	Total	82

H. PEMBINAAN KADER ILMIAH

1. Staf pengajar pada Fakultas Ekonomi, Universitas Trisaksi (2001-2004).
2. Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi, Binus University (2000-2004).
3. Penguji dan pembimbing S3 di IPB University dan Universitas Indonesia.
4. Pembimbing Diklat peneliti tingkat dasar, Pusbindiklat LIPI (2014-2015).

I. ORGANISASI PROFESI ILMIAH

1. Anggota Dewan Riset Nasional (2015–2019).
2. Anggota Persatuan Peneliti Indonesia 2020–sekarang.

J. TANDA PENGHARGAAN

No.	Penghargaan	No. Sertifikat	Tanggal Sertifikat
1.	Satyalancana Karya Satya X Tahun	27/TK/ TAHUN 2010	20 Juli 2010
2.	Satyalancana Karya Satya XX Tahun	49/TK/ TAHUN 2014	6 Agustus 2014
3.	Satyalancana Karya Satya XXX Tahun	65/TK/ TAHUN 2024	2 Juli 2024
4.	Satyalancana Pembangunan	55/TK/ TAHUN 2014	6 Agustus 2014

Keberadaan industri keuangan mikro sangat esensial karena sebagai sumber utama pembiayaan usaha mikro-kecil (UMK)—pilar utama perekonomian nasional dan sumber pendapatan masyarakat kecil tetapi secara persisten menghadapi kelangkaan modal. Naskah orasi mengambil tema sentral program kredit mikro karena intervensi kebijakan ini telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam periode yang panjang dan berskala besar, tetapi akses pembiayaan bagi UMK masih tetap rendah. Kontribusi utama orasi ini adalah bahwa implementasi program kredit mikro harus mempertimbangkan tiga aspek penting, yaitu: (1) prinsip kompleksitas dalam karakteristik keuangan mikro, (2) prinsip segmentasi persaingan, dan (3) prinsip kontradiksi dimana penyaluran program kredit bersubsidi melalui perbankan cenderung distortif, dan berpotensi memarginalkan LKM. Dalam kerangka ini, program kredit mikro harus didesain bukan hanya untuk menyediakan kredit murah bagi UMK, tetapi secara simultan memperkuat kemampuan bisnis LKM.

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,
Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kota Jakarta Pusat 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.3702

ISSN 3090-8485